

PEMBERDAYAAN PETERNAK MISKIN
(Studi Kasus Pemberdayaan Peternak Itik di Desa Sitemu
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah)

TRİYATNO YULIHARSO



SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2008

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir "*Pemberdayaan Peternak Miskin (Studi Kasus Pemberdayaan Peternak Itik di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah)*" adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.

Bogor, April 2008

TRİYATNO YULIHARSO
NRP I 354060295

Lampiran 7 Dokumentasi Diskusi Kelompok Terfokus dan Profil Responden



Fasilitator diantara Ketua kelompok tani dan Utusan dari Dinas Pertanian dan Peternakan



Anggota kelompok tani ternak itik



Utusan dari Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Pemalang



Utusan dari Bidang Produksi/Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pemalang

Gambar 1 Suasana Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) bertempat di Sekretariat Kelompok Tani Ternak Itik Sri Rejeki Desa Sitemu

PEMBERDAYAAN PETERNAK MISKIN
(Studi Kasus Pemberdayaan Peternak Itik di Desa Sitemu
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah)

TRİYATNO YULIHARSO

Tugas Akhir
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Profesional pada
Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2008

Judul Tugas Akhir : Pemberdayaan Peternak Miskin (Studi Kasus
Pemberdayaan Peternak Itik di Desa Sitemu
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi
Jawa Tengah)

Nama Mahasiswa : TRIYATNO YULIHARSO
N R P : I 354060295

Disetujui
Komisi Pembimbing

Ir. Fredian Tonny, MS
Ketua

Edi Suharto, Ph.D
Anggota

Diketahui
Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

Tanggal ujian: 1 April 2008

Tanggal lulus:

© Hak cipta milik IPB, tahun 2008

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. *Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:*
 - a. *Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.*
 - b. *Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB*
2. *Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB*

ABSTRACT

TRİYATNO YULIHARSO, **Empowerment Livestock Poor (Case Study Empowerment Livestock Poor in Sitemu Village, District Taman, Region Pemalang, Provinsi Central Java)**. Under the direction of Fredian Tonny Nasdian and Edi Suharto.

Livestock industry have been playing the important in national economics. In the economic crisis, livestock enterprises have proven survive and than of local economic can be well-being village community through creating employment and investment.

Problem faced by livestock are capital problem, access material, access technology, networking in institutional livestock group, low human resources, marketing egg duck.

The Community Development Research executed in three phase, there are social mapping, evaluate the program and empowerment research livestock poor in improving well-being livestock.

Research method used is qualitative method. Technique of qualitative data collecting used are observation, in depth interview and Focus Group Discussion (FGD). Problem identified with the descriptive analysis, program compilation executed with livestock community in FGD forum.

Result of research indicate that poorness that happen at breeder duck in Sitemu Village because of breeder duck enterprise to have a loss effect avian influenza epidemic, tied pengijon/tengkulak, scale of is effort inefficient and downhill (it) investment to effort duck livestock. The Empowerment Program conducted by (1) Revitalization of Farmer Group, (2) Network Development and (3) Empowerment Mertelu Sistem.

Keywords: empowerment, farmer group, capacity institution

ABSTRAK

TRIYATNO YULIHARSO, Pemberdayaan Peternak Miskin (Studi Kasus Pemberdayaan Peternak Itik di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah). Dibimbing oleh FREDIAN TONNY sebagai Ketua, EDI SUHARTO sebagai anggota komisi pembimbing.

Usaha ternak unggas mempunyai peran yang cukup penting dalam perekonomian nasional. Dalam krisis ekonomi usaha ternak itik bisa bertahan dan merupakan salah satu usaha ekonomi lokal yang bisa mensejahterakan masyarakat pedesaan dengan terciptanya lapangan kerja dan menarik investasi.

Permasalahan yang dihadapi oleh para peternak itik adalah masalah permodalan, akses bahan pakan, akses teknologi, jaringan kerjasama di dalam kelembagaan kelompok tani sumberdaya manusia peternak yang masih rendah, pemasaran telur itik yang dikuasai oleh tengkulak. Permasalahan lain adalah bagaimana menyusun strategi dan program pemberdayaan peternak secara partisipatif.

Kajian pengembangan masyarakat ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama dengan melakukan pemetaan sosial. Tahap kedua melalui evaluasi program dan tahap ketiga dengan melakukan kajian pemberdayaan peternak miskin.

Metode kajian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan berperanserta, wawancara mendalam dan FGD. Permasalahan diidentifikasi dengan analisis deskriptif, penyusunan program dilaksanakan bersama komunitas peternak itik dalam forum FGD dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi pada peternak itik di Desa Sitemu disebabkan usaha ternak itik banyak mengalami kerugian akibat fluktuasi harga pakan, wabah flu burung, ikatan para pengijon/tengkulak, skala usaha yang tidak efisien dan menurunnya investasi ke usaha ternak itik. Program pemberdayaan dilakukan dengan (1) Revitalisasi kelompok tani, (2) Pengembangan jejaring, dan (3) Pendayagunaan sistem *mertelu* untuk mendatangkan investasi terhadap usaha ternak itik.

Kata kunci: pemberdayaan, peternak miskin, penguatan kelembagaan

RINGKASAN

TRİYATNO YULIHARSO, Pemberdayaan Peternak Miskin (Studi Kasus Pemberdayaan Peternak Itik di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah). Dibimbing oleh FREDIAN TONNY sebagai Ketua, EDI SUHARTO sebagai anggota komisi pembimbing.

Pembangunan di bidang pertanian yang dilakukan sekarang ini meliputi pembangunan di bidang tanaman pangan, peternakan dan kehutanan. Pembangunan tersebut merupakan suatu keharusan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan pertanian adalah: (1) Memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, (2) Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, peternak, pekebun, nelayan, masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, (3) Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan (4) Meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan pembangunan pertanian, Kabupaten Pemalang juga melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK). Program ini merupakan program pengembangan ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan agribisnis baik pada usaha budidaya maupun pengolahan hasil komoditas pertanian (tanaman pangan, peternakan dan perikanan). Salah satu desa penerima program ini adalah di Desa Sitemu. Di desa ini sebagian penduduknya berprofesi sebagai peternak itik petelur sejak puluhan tahun, tetapi sebagian dari mereka masih banyak yang miskin.

Tujuan umum dari kajian pengembangan masyarakat ini adalah untuk mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kelembagaan yang ada pada komunitas peternak itik. Adapun bila dijabarkan lebih lanjut, tujuan khusus dari kajian ini adalah: (1) Mengetahui dan menganalisa kelembagaan dan program pengembangan peternak itik di Desa Sitemu, (2) Mengetahui dan menganalisa kemiskinan yang terjadi pada peternak itik di Desa Sitemu, (3) Mengetahui upaya-upaya dalam penguatan kelembagaan yang ada di Desa Sitemu dan (4) Menyusun program pemberdayaan peternak miskin.

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD) terhadap peternak miskin, tokoh masyarakat, pengurus kelompok tani dan petugas yang menangani program pemberdayaan peternak itik dan kelembagaan kelompok tani. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, penelusuran dokumen yang ada di kelompok tani, Desa Sitemu dan dokumen pelaksanaan program yang ada di Kantor Bappeda dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pemalang. Untuk mencapai tujuan penelitian, analisis yang digunakan adalah analisis kemiskinan, analisis kelembagaan dan analisis pengembangan masyarakat.

Hasil analisis kemiskinan pada peternak itik di Desa Sitemu menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi pada peternak itik disebabkan usaha ternak itik banyak mengalami kerugian akibat fluktuasi harga pakan, wabah flu burung, ikatan para pengijon/tengkulak dan kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada upaya memberdayakan peternak miskin.

Hasil analisis kelembagaan dan pengembangan masyarakat yang ada di Desa Sitemu menunjukkan bahwa program pengembangan masyarakat yang ada belum bisa memberdayakan peternak miskin. Hal ini disebabkan kapasitas kelembagaan penerima program masih lemah, kelembagaan kelompok tani dan kelembagaan *mertelu* tidak berkembang, modal sosial belum terbentuk, lembaga keuangan dan keagamaan belum dilibatkan dalam pelaksanaan program.

Dari hasil analisis tersebut maka disusun strategi dan program aksi penguatan kapasitas kelembagaan melalui: (1) Revitalisasi kelompok Tani, (2) Pengembangan Jejaring dan (3) Pendayagunaan Sistem *Mertelu* untuk mendatangkan Investasi Dalam Usaha Ternak Itik.

Kata kunci: pemberdayaan, kelompok tani, kapasitas kelembagaan

Penguji luar komisi pada ujian Tugas Akhir: Dr. Ir. Ninuk Purnaningsih, MS

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jadual Praktek Kajian Pengembangan Masyarakat	21
2. Jumlah Penduduk Desa Sitemu Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006	26
3. Komposisi Penduduk Desa Sitemu Berdasarkan Mata pencaharian	27
4. Matriks Kapasitas Peternak Miskin di Desa Sitemu	65
5. Matriks Kelembagaan dan Stakeholders yang Berhubungan dengan Peternak Miskin di Desa Sitemu	69
6. Rancangan Program Pemberdayaan Peternak Miskin Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Kajian Pemberdayaan Peternak Miskin Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani.....	19
2. Gambar 2 Piramida Penduduk Desa Sitemu berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin, Tahun 2006.....	26
3. Diagram Venn Kelembagaan di Desa Sitemu.....	28
4. Struktur Organisasi PPEK Masa Proyek	37
5. Struktur Organisasi PPEK Pada Pelestarian Proyek.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Tabel Metode Pengumpulan Data	90
2. Peta Lokasi Kajian	91
3. Daftar Nama-nama Peternak Itik di Desa Sitemu.....	92
4. Daftar Pertanyaan untuk Anggota Kelompok Tani	93
5. Daftar Pertanyaan untuk Petugas Pengelola Program PPEK	94
6. Daftar Pertanyaan untuk Petugas Dinas Pertanian dan Peternakan yang Menangani Pemberdayaan Kelompok Tani.....	95
7. Daftar Pertanyaan untuk Pengurus Kelompok Tani	96
8. Dokumentasi Kegiatan Kajian.....	97

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia. Ketiga aspek pembangunan ini saling berkaitan di dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagaimana fungsi dari pembangunan nasional, dimana ada tiga tugas utama yang mesti dilakukan sebuah bangsa (*nation-state*), yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*) (Suharto, 2006).

Disamping ketiga aspek pembangunan yang dilaksanakan, sebagai negara yang dikenal dengan sebutan negara agraris, Indonesia juga melaksanakan pembangunan di bidang pertanian. Pembangunan di bidang pertanian ini sangat strategis karena menyangkut harkat dan martabat suatu bangsa berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya yang sangat mendasar yaitu kecukupan pangan.

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan adalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable development*) baik di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Pembangunan tersebut merupakan suatu keharusan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, peternak, pekebun, nelayan, masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga kelestarian lingkungan (UU No.16 Tahun 2006).

Pembangunan di bidang pertanian yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Pematang sekarang ini, secara khusus berkaitan dengan pemberdayaan peternak itik. Pemberdayaan terhadap peternak itik yang tergolong miskin merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat karena peternak miskin merupakan bagian dari komunitas yang ada di dalam masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di desa-desa di Kabupaten Pematang. Salah satu desa yang sudah lama mendapatkan program pemberdayaan

peternak itik adalah Desa Sitemu yang memiliki kelompok tani ternak itik “Sri Rejeki“. Program pemberdayaan peternak tersebut berasal dari pemerintah pusat, provinsi serta pemerintah kabupaten.

Adapun program-program yang pernah ada pada peternak itik di Desa Sitemu sejak Kelompok tani Ternak Itik “Sri Rejeki” terbentuk (1992) sampai yang terakhir diantaranya adalah IDT (Inpres Desa Tertinggal), SPAKU (Sentra Produksi Agribisnis Komoditas Unggulan), PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi), KKP (Kredit Ketahanan Pangan), Program pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP), serta Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK).

Berbagai program yang dilaksanakan tersebut belum bisa meningkatkan kesejahteraan peternak itik yang ada di Desa Sitemu. Hal ini bisa diketahui dari jumlah peternak itik yang ada sebagian besar dalam kondisi miskin, jumlah rumah tangga peternak semakin berkurang dan banyak peternak yang usahanya berhenti dan beralih ke usaha lain.

Dari berbagai program tersebut, program PPEK merupakan program pemberdayaan terhadap kelompok usaha di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan termasuk di dalamnya peternak itik yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2004, dan sebagai pelaksana program adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang. Adapun penerima proyek adalah kelompok usaha ternak itik dengan anggota antara lima sampai 10 orang untuk setiap kelompok usaha.

Di Desa Sitemu sendiri ada enam kelompok usaha penerima proyek dan satu orang usaha perorangan. Jumlah dana yang diterima oleh peternak itik yang ada di Desa Sitemu sebesar Rp. 130 juta. Sebagian kelompok usaha penerima pinjaman modal dari proyek tersebut sudah ada yang mampu melunasi, dan sebagian lagi masih mengajukan pinjaman secara perorangan dan belum lunas.

Desa Sitemu memiliki jumlah penduduk 3.668 jiwa, terdiri atas laki-laki 1783 jiwa dan perempuan 1885; terdapat 977 KK, dengan mata pencaharian penduduknya 139 KK (petani tanaman pangan), 114 KK (pedagang), 32 KK (peternak itik), 421 KK (buruh tani), 29 KK (buruh ternak), 54 KK (buruh nelayan), 38 KK (buruh perdagangan), 79 KK (buruh bangunan), 21 KK (PNS), 20 KK (jasa), 30 KK (lain-lain). Sedangkan jumlah keluarga miskin menurut hasil

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSEP) pada tahun 2005 berjumlah 340 KK miskin (BPS Kabupaten Pemalang-Jawa Tengah, 2006).

Di Desa Sitemu sebagian keluarga miskin bekerja pada usaha peternakan itik sebagai buruh harian, sebanyak 29 KK. Buruh yang bekerja di peternak itik adalah buruh harian lepas, yang bekerja selama sepuluh jam per hari dengan upah 20 ribu rupiah. Buruh ternak tersebut bertugas mengambil telur, mencuci tempat pakan ternak, mencampur formulasi pakan, memberikan pakan, mencacah ikan segar dan memberikan kepada ternak.

Dengan melihat deskripsi data dan perkembangan sosial ekonomi peternak itik yang ada di Desa Sitemu, kebijakan program pemberdayaan masyarakat di pedesaan khususnya pada komunitas peternak itik menjadi sangat penting. Kebijakan tersebut tidak sebatas pada pemberian bantuan modal/pinjaman bergulir melalui pendekatan kelompok tani, tetapi juga perlu mengembangkan kapital sosial yang dimiliki oleh masyarakat seperti *trust* (kepercayaan) dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat peternak itik. Perlunya dikembangkan kelembagaan tradisional yang sudah ada dan berkembang di masyarakat pedesaan, seperti "*mertelu*" yaitu pola kerjasama dengan pembagian hasil, pemilik modal mendapatkan satu bagian dan pemelihara ternak mendapat tiga bagian. Pola kerjasama tersebut bisa mendatangkan investasi terhadap usaha pengembangan ternak itik, sehingga peternak tidak semata-mata menggantungkan permodalan hanya dari program bantuan/proyek pemerintah.

Sehubungan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kegiatan pemberdayaan terhadap peternak itik di Desa Sitemu dan keberadaan Kelompok tani Ternak Itik "Sri Rejeki" dari aspek kelembagaan non formal yang dimiliki oleh peternak dan kelembagaan tradisional "*mertelu*" yang ada di Desa Sitemu yang turut berperan dalam pemberdayaan peternak miskin.

Adapun pertanyaan pokok kajian ini adalah "Bagaimana strategi pemberdayaan peternak miskin yang perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak itik di Desa Sitemu, Kabupaten Pemalang?"

1.2 Perumusan Masalah

Desa Sitemu sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan lahan pertanian tanaman pangan yang luas

sangat memungkinkan berkembangnya usaha ternak itik. Usaha ternak itik di Desa Sitemu sudah ada sejak lama dan hampir setiap rumah tangga memiliki ternak itik mulai dari pemilikan kecil sampai yang besar, sehingga Desa Sitemu dikenal sebagai sentra ternak itik. Dengan banyaknya rumah tangga yang beternak itik, berkembang pula usaha-usaha yang berkaitan dengan ternak itik seperti: usaha perdagangan bibit ternak itik, telur, pakan ternak, serta bekerja sebagai buruh di peternak itik. Akan tetapi kondisi peternak itik yang ada sekarang ini sebageian besar dalam kondisi miskin. Fenomena tersebut ditunjukkan dari kondisi perumahan yang kumuh, kesehatan dan pendidikan anggota keluarga yang rendah serta banyaknya pinjaman uang yang dimiliki oleh para peternak baik ke lembaga keuangan, pengijon maupun dinas/lembaga pemerintah yang memberikan pinjaman modal usaha ternak itik.

Dari sisi kelembagaan, peternak itik yang ada di Desa Sitemu telah membentuk kelompok ternak itik sejak tahun 1992, dengan anggota 15 orang dari 73 peternak yang ada pada waktu itu. Saat itu Desa Sitemu termasuk dalam kriteria desa tertinggal. Dalam kurun waktu dua tahun, Kelompok tani ternak itik "Sri Rejeki" yang dibentuk tersebut telah berkembang kegiatannya dan berhasil membentuk koperasi tani ternak itik Sri Rejeki pada tahun 1994. Dan mulai saat itulah kelompok tani ternak/Koperasi tani ternak itik yang ada mendapatkan bantuan modal dan pinjaman dari berbagai dinas/instansi.

Akan tetapi bantuan dan pinjaman modal yang diterima tidak bisa lestari dan hanya beberapa tahun saja koperasi tersebut berjalan dan pada akhirnya macet. Hal ini disebabkan karena kendala manajemen. Dan mulai tahun 2002 kelompok tani ternak itik ini mulai aktif kembali dengan adanya pembinaan kelompok untuk mengikuti evaluasi kelompok agribisnis berbasis ternak itik tingkat nasional. Pada tahun 2003 kelompok tani ternak itik Sri Rejeki berhasil masuk dalam klasifikasi terbaik III .

Pasca lomba, pada tahun 2003 kelompok tani mendapatkan bantuan modal untuk kelompok usaha dari Proyek Pemberdayaan Agribisnis Peternakan (PPAP) dari dana APBN sebesar 100 juta rupiah untuk pengembangan modal bagi 20 peternak anggota kelompok dan sebagian dana yang diterima digunakan untuk usaha bersama perdagangan telur. Pola bantuan tersebut bersifat bantuan langsung masyarakat (BLM/*Block Grant*) dan dana pengembalian dari peternak setelah terkumpul di kelompok, digulirkan kembali kepada peternak itik yang belum menerima paket bantuan dana. Setiap peternak menerima dana pinjaman

sebesar lima juta rupiah tanpa memberikan agunan dan dana yang diterima harus dikembalikan dalam jangka waktu dua tahun.

Pada enam bulan pertama setelah penerimaan bantuan usaha yang dilakukan kelompok berkembang dan berhasil menjalin kerjasama perdagangan telur dengan pedagang telur dari Brebes dan Jakarta. Akan tetapi usaha kelompok dan dana yang digulirkan kepada penerima baru hanya berjalan tujuh bulan dengan tujuh orang peternak baru sebagai penerima dana perguliran, sehingga anggota kelompok bertambah menjadi 27 peternak. Pada akhir tahun 2003 usaha yang dilakukan oleh kelompok mengalami kesulitan akibat adanya kenaikan harga pakan ternak dan wabah flu burung.

Pada awal tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Pematang melaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) dengan mengalokasikan dana APBD P (Perubahan) sebesar 1,880 milyar untuk pengembangan agribisnis bagi kelompok usaha maupun perorangan yang memenuhi syarat yang ditentukan dengan mengajukan proposal usaha.

Setelah melalui proses survey kelayakan usaha yang dilakukan oleh Tim PPEK, peternak itik yang ada di Desa Sitemu mendapatkan dana pinjaman sebesar 130 juta rupiah untuk 31 peternak itik. Keseluruhan peternak penerima dana tersebut terbagi dalam enam kelompok kecil dengan anggota lima peternak untuk setiap kelompok usaha dan satu orang usaha ternak perorangan. Setiap kelompok usaha/perorangan harus menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik (SHM). Setelah menerima dana PPEK, usaha peternak itik mulai berkembang kembali dan peternak bisa mengangsur pinjaman yang diterima setiap bulan yang dikumpulkan oleh masing-masing ketua sub kelompok usaha. Keterlambatan dalam pengembalian dana akan dikenakan denda yang akan ditanggung oleh setiap anggota sub kelompok. Kegiatan kelompok berjalan kembali sampai dengan pelunasan pinjaman (24 bulan). Dari sisi pengembalian pinjaman, program ini dinilai berhasil, akan tetapi dari sisi sosial ekonomi peternak kecil (pemilikan di bawah 200 ekor) belum tampak adanya peningkatan kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dari skala pemilikan ternak itik yang tidak bertambah, peternak masih terikat pinjaman uang kepada beberapa pengijon, pinjaman ke beberapa lembaga keuangan baik yang ada di desa maupun di luar serta pendapatan rata-rata peternak masih kurang dari Rp 20.000,-/ hari.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut adalah :

1. Mengapa kelembagaan dan program pengembangan masyarakat yang ada di Desa Sitemu belum bisa memberdayakan peternak miskin?
2. Mengapa peternak itik yang ada di Desa Sitemu masih banyak yang miskin?
3. Bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan yang perlu dilakukan?
4. Bagaimana strategi pemberdayaan peternak miskin dan penguatan kelompok tani ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari Studi Kasus Pemberdayaan Peternak Miskin ini secara umum adalah untuk mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada komunitas peternak itik miskin melalui penguatan kapasitas kelembagaan Kelompok tani Ternak Itik. Adapun secara khusus kajian ini bertujuan untuk ;

1. Mengetahui dan menganalisa kelembagaan dan program pengembangan peternak itik yang ada di Desa Sitemu;
2. Mengetahui dan menganalisa kemiskinan yang terjadi pada peternak itik di Desa Sitemu;
3. Mengetahui upaya-upaya dalam penguatan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Sitemu;
4. Menyusun program pemberdayaan peternak miskin melalui penguatan kapasitas kelembagaan Kelompok tani.

Kegunaan kajian ini adalah (1) memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pemberdayaan peternak itik yang tergolong miskin, sehingga dapat dijadikan alternatif di dalam memecahkan permasalahan, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin peternak itik; (2) dapat menjadi masukan bagi penentu kebijakan pembangunan lokal (Pemerintah Kabupaten) Pematang dan jajarannya agar lebih memperhatikan peran dan potensi keluarga miskin dan masyarakat melalui usaha ternak itik; dan (3) dapat dijadikan model pemikiran bagi pengembangan ekonomi lokal masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan dan Peternak Miskin

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga sering didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Smeru dalam Suharto *et.al.*, 2004).

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, atau struktural (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per hari adalah contoh pengukuran absolut (Ellis dalam Suharto, 2006).

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan

non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan menunjuk pada suatu kondisi keterbatasan dan ketidakcukupan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sumodiningrat (1999) beranggapan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar jangkauan individu yang menghambat seseorang untuk meraih kesempatan. Dengan perkataan lain, bukan karena seseorang tidak mau bekerja tetapi struktur yang ada menjadi hambatan.

Program pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil jika indikator-indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program tersebut terpenuhi. Adapun indikator-indikator tersebut menurut Sumodiningrat (1998) adalah: (1) berkurangnya jumlah penduduk yang termasuk dalam kriteria miskin; (2) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia; (3) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya; (4) meningkatnya kemandirian kelompok ditandai oleh makin berkembangnya usaha ekonomi produktif anggota dan kelompok, dan makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok dan makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lainnya dalam masyarakat.

Dengan demikian kemiskinan yang dialami oleh komunitas peternak itik yang ada di Desa Sitemu bisa diketahui dari kondisi keterbatasan dan ketidakcukupan yang dialami oleh peternak itik sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik bagi dirinya maupun anggota keluarganya. Hak-hak dasar tersebut seperti kecukupan pangan, rumah yang layak, pendidikan yang cukup bagi anak-anaknya dan kesehatan.

Berbagai studi memberi gambaran bahwa kemiskinan suatu komunitas dicirikan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia, kecilnya penguasaan asset produktif seperti ternak itik yang dimiliki dan rendahnya dan rendahnya aksesibilitas anggota komunitas (peternak itik) terhadap sumber-sumber permodalan dan peluang-peluang ekonomi. Menurut Ampang (1984), petani

pemilik lahan sempit, petani penggarap dan buruh tani di pedesaan dapat di definisikan sebagai anggota atau bagian dari masyarakat miskin (petani miskin).

Pengertian peternak miskin jika ditinjau dari aspek ekonomi dicirikan sebagai berikut :

- (a) Pendapatan rumah tangga peternak rendah (termasuk pendapatan di luar usaha tani ternak). Dari perhitungan pendapatan rumah tangga petani peternak ini bisa dihitung pendapatan per kapita, yang selanjutnya dipergunakan untuk menentukan kedudukan peternak terhadap garis kemiskinan. Petani peternak tersebut disebut miskin bila tingkat pendapatan per kapita per tahun kurang dari 320 kilogram setara dengan beras untuk daerah pedesaan (menurut klasifikasi Sajogyo);
- (b) Jumlah kepemilikan ternak relatif kecil. Rata-rata kepemilikan ternak kurang dari 200 ekor;
- (c) Produktivitas tenaga kerja rendah. Penggunaan tenaga kerja tidak efisien, sehingga pendapatan per kapita rendah;
- (d) Modal (capital) relatif kecil atau tidak ada. Karena pendapatan rendah, simpanan/tabungan yang dimiliki sangat kecil atau bahkan tidak ada. Akibatnya kesempatan untuk memperluas usahanya menjadi sangat terbatas. Selain uang tunai, pengertian modal di sini termasuk tanah, ternak, dan peralatan;
- (e) Tingkat keterampilan (skill) rendah. Secara umum, keterampilan petani miskin rendah. Akibatnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan manajerialnya juga juga rendah. Akibat selanjutnya respon mereka terhadap teknologi baru lambat, sehingga produktivitas usaha secara keseluruhan rendah (Ampang, 1984).

Ciri-ciri peternak miskin di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait mengkait satu sama lain serta saling pengaruh-mempengaruhi penilaian terhadap peternak apakah dia termasuk peternak miskin atau tidak (Prayitno dan Arsyad, 1986)

Demikian halnya peternak itik dengan skala pemilikan kecil, peternak yang memelihara itik dengan sistem *mertelu*, buruh pengembala ternak itik, buruh pemberi makan ternak itik. Mereka semua didefinisikan sebagai bagian dari peternak miskin. Dari aspek ekonomi mereka dicirikan sebagai berikut: (1) pendapatan rumah tangga rendah; (2) asset yang dimiliki sedikit; (3) produktivitas

tenaga kerja rendah; (4) modal kerja relatif kecil atau tidak ada; (5) dan tingkat keterampilan (*skill*) secara umum rendah.

2.2 Komunitas

Komunitas sebagaimana diungkapkan oleh Nasdian (2005) adalah orang-orang yang hidup di suatu tempat (lokasi) dimana mereka mampu membangun sebuah konfigurasi sosial budaya, dan secara bersama-sama menyusun aktifitas-aktifitas kolektif (*collective action*). Menurut Young (1984) dan Soetarto (2005) komunitas memiliki ciri-ciri: (1) menempati suatu wilayah/teritorial; (2) mempunyai kepentingan sosial-ekonomi bersama; (3) mempunyai pola hubungan sosial-ekonomi bersama; (4) memiliki suatu konstelasi pranata sosial, dan (5) tunduk pada pengendalian grup sampai taraf tertentu.

Dengan demikian komunitas dapat dikenal karena adanya faktor penciri atau pembeda yang secara cepat dapat diidentifikasi. Berdasarkan ciri-ciri yang menyertainya, maka peternak itik miskin dapat disebut sebagai komunitas. peternak miskin memiliki pembeda yang secara cepat dapat diidentifikasi yaitu mata pencaharian pokok beternak, mengusahakan ternak itik yang dimiliki dengan bantuan tenaga keluarga sendiri, interaksi sosial berlangsung secara kontinyu, memiliki budaya dan adat istiadat yang bercirikan masyarakat tradisional, kuatnya ikatan dengan alam, serta eratnya ikatan di dalam kelompok.

Komunitas peternak miskin sangat penting artinya dalam proses pemberdayaan untuk pengembangan masyarakat. Oleh karena di dalamnya terkandung komponen orang, tempat dimana komunitas berada dan adanya interaksi antar anggota yang perlu dikembangkan sesuai dengan adat istiadat setempat dalam rangka mencapai tujuan kemandirian komunitas. Selain dari itu dengan berkembangnya usaha peternak itik yang ada akan berdampak positif terhadap komunitas yang lain.

2.3 Pemberdayaan

Sumodiningrat (1998) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu petani/peternak yang mengalami masalah

kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu petani/peternak miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan ini seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebuah proses.

Suharto (1997) mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, terutama kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan pula bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Ife dalam Suharto (2006:59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- (1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan;
- (2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya;

Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran

barang serta jasa. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pemberdayaan juga bisa dipahami dari perspektif *zero-sum* dan *positive-sum*. Dalam perspektif ini terjadi transfer kekuasaan (power) dari penguasa kepada masyarakat untuk mewujudkan pemberdayaan. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi masyarakat yang semula obyek menjadi subyek dan mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi relasi subyek-subyek.

Dengan demikian, transfer kekuasaan ini merupakan faktor yang penting di dalam mewujudkan pemberdayaan. Terdapat dua perspektif atas dimensi power, yaitu perspektif distributif yang menghambat pemberdayaan, dan perspektif generatif yang cenderung mendukung pemberdayaan (Mas'ood dalam Basri, 2006:21-22). Bila power ditinjau dari dalam perspektif distributif, maka ia bersifat *zero-sum* dan sangat kompetitif. Kalau yang satu mempunyai daya berarti yang lain tidak punya. Kalau satu pihak memperoleh tambahan daya berarti pihak yang lain kehilangan.

Sebaliknya, yang berlaku pada sisi perspektif generatif bersifat *positive-sum*. Artinya, pemberian kepada pihak lain dapat meningkatkan daya sendiri. Kalau daya suatu unit sosial secara keseluruhan meningkat, semua anggotanya dapat menikmati bersama-sama. Dalam hal ini pemberian daya kepada peternak miskin secara tidak langsung juga akan meningkatkan daya si pemberi, yaitu pemerintah beserta jajarannya.

Menurut Rukminto (2001), pemberdayaan adalah memberikan masyarakat sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi komunitas.

Pemberdayaan peternak miskin yang berbasis usaha ternak itik di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah ini diarahkan pada usaha-usaha agar anggota kelompok tani ternak itik yang ada bisa memperoleh kekuatan dan akses sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka dan Moeljanto, 1996).

2.4 Kelembagaan dan Kapital Sosial

Soekanto mendefinisikan kelembagaan sebagai himpunan norma-norma yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia. Sedangkan Koentjoroningrat (1981) menggunakan istilah pranata sosial untuk menjelaskan kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Kelembagaan merupakan suatu yang stabil, mantap dan berpola, berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat, ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan moderen atau bisa berbentuk tradisional dan moderen dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.

Sementara Syahyuti (2003) menunjukkan bahwa jika masuk ke dalamnya, maka terlihat ada dua aspek dalam kelembagaan, yaitu (1) aspek kelembagaan -- perilaku, (2) aspek keorganisasian ---struktur. Keduanya merupakan komponen pokok dalam setiap kelompok sosial. Perhatian pokok aspek kelembagaan adalah perilaku dengan kompleks faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut.

Sedangkan kapital sosial menurut Colleta dan Cullen (2000) didefinisikan sebagai " suatu sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial dan ekonomi, seperti pandangan umum (*world view*), kepercayaan (*trust*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), pertukaran ekonomi dan informasi (*informational and economic exchange*), kelompok-kelompok formal dan informal (*formal and informal groups*), serta asosiasi yang melengkapi kapital-kapital lainnya (fisik, manusiawi, budaya) sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Adanya hubungan antar kelembagaan dan kapital sosial karena di dalam kelembagaan memiliki komponen struktural (peran, jaringan, dan hubungan) dan kognisi (norma, nilai, sikap, dan kepercayaan) dan diantara komponen tersebut terdapat dalam kapital sosial (Tonny, 2007). Kapital sosial tertambat pada struktur sosial yang ada di dalam masyarakat yang mungkin tidak disadari keberadaannya oleh masyarakat itu sendiri. Pada tingkat kapital sosial tinggi, mampu memunculkan lembaga yang memiliki tingkatan organisasi mantap (Bahri, 2007).

Pembentukan kelompok tani merupakan perwujudan untuk meningkatkan kepercayaan antar anggota maupun antara anggota dengan pengurus. Kegiatan seperti usaha bersama, arisan dengan menggunakan setoran telur itik di dalam kelompok tani tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kapital sosial di dalam kelompok.

2.5 Pengembangan Kelembagaan

Pengertian pengembangan kelembagaan (*institutional development*) atau pembinaan kelembagaan (*institutional building*) sebagaimana disampaikan Israel (1990) adalah pengembangan kelembagaan sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumberdaya manusia dengan keuangan yang tersedia. Proses ini dapat secara internal digerakkan oleh manajer sebuah lembaga atau dicampurtangani dan dipromosikan oleh pemerintah atau oleh badan-badan pembangunan.

Sementara konsep pengembangan kelembagaan yang didefinisikan oleh badan-badan donor mengatakan bahwa “pengembangan kelembagaan adalah proses menciptakan pola baru kegiatan dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu karena didukung oleh norma, standar dan nilai-nilai dari dalam”.

Dengan demikian pengembangan kelembagaan kelompok tani ternak yang merupakan wadah dari para peternak itik, dimaksudkan agar di dalam kelompok tani tersebut tercipta pola baru di dalam kegiatan usaha ternak itik dan perilaku peternak yang baru dan lestari karena didukung oleh norma, standar dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Desa Sitemu.

Mengacu Soelaiman dan Nuryana (1999), tahap perkembangan dinamis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan menggunakan lima indikator ekonomi, dapat digolongkan menjadi tiga jenjang:

1. Tumbuh, jika dari segi permodalan masih mengandalkan pada bantuan modal awal yang diberikan oleh pelaksana program yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga lainnya; dari segi penganekaragaman usaha baru satu jenis yang diusahakan; dari segi pemasaran, produksi hanya dipasarkan di lingkungan desa; dari segi rencana usaha bersama (RUB) belum ada; dari segi rencana pengembangan usaha belum ada.
2. Berkembang, jika dari segi permodalan sudah memperoleh bantuan modal pengembangan usaha; dari segi penganekaragaman usaha sudah ada dua

jenis; dari segi pemasaran, produksi sudah bisa menjangkau kecamatan; dari segi RUB sudah disusun tetapi belum dilaksanakan; dari segi rencana pengembangan sudah ada dalam bentuk rencana.

3. Maju, dari segi permodalan sudah dapat mengusahakan modal dari sumber-sumber keuangan lainnya (kredit); dari segi penganekaragaman usaha sudah ada tiga atau lebih jenis usaha; dari segi pemasaran sudah menjangkau luar kecamatan; dari segi RUB sudah ada dan dilaksanakan; dari segi rencana pengembangan usaha sudah ada upaya perintisan.

2.6 Kelompok Tani

Menurut Gerungan (1978), kelompok adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dua atau lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara intensif dan teratur sehingga sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut.

Adapun pengertian kelompok tani adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling pengaruh-mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong (Mardikanto dalam Lucie Setiana, 2005)

Sedangkan Departemen Pertanian (2007) memberi pengertian kelompok tani sebagai kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

2.7 Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

Peningkatan kapasitas atau kemampuan Kelompok tani dimaksudkan agar kelompok dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama dan unit produksi, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran dan unit jasa penunjang sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri (Departemen Pertanian, 2007).

Dalam konteks pengembangan kapasitas komunitas, mengacu Tonny, dkk (2002) pemerintah lokal diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator, sehingga

seluruh *stakeholders* mampu mensinergikan aktivitas pengembangan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumberdaya lokal.

Dengan demikian akan terjadi peningkatan dalam hubungan kelembagaan yang ada di dalam kelompok tani dengan komunitas yang ada di Desa Sitemu (*Bonding*), kemudian berkembang hubungan komunitas peternak yang ada di Desa Sitemu dengan komunitas peternak yang ada di luar desa (*Bridging*) serta meningkatnya hubungan antara kelompok tani dengan kelembagaan pelayanan publik dan finansial (*Creating*) untuk memperkuat modal kelompok tani.

2.8 Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial merujuk pada Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thomson, Suharto (2006a), dan Suharto (2006b) menyatakan bahwa pengertian kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna dimana salah satunya adalah sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Midgley, et al (2000):xi mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “ *a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi: serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

2.9 Pekerjaan Sosial

Pengertian Pekerjaan Sosial menurut Suharto (2007:193) dapat dimaknai baik sebagai disiplin akademis maupun profesi kemanusiaan. Dalam konteks pemberdayaan peternak miskin pengertian pekerjaan sosial berkaitan dengan profesi kemanusiaan yang menunjuk pada keahlian profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) individu, kelompok, keluarga dan masyarakat sehingga memiliki kapasitas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya maupun dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*shock and stresses*) yang menerpa kehidupannya.

III. METODOLOGI KAJIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Kondisi kemiskinan yang terjadi pada komunitas peternak itik di Desa Sitemu memiliki dampak pada ketidakberdayaan masyarakat. Karena usaha ternak itik merupakan usaha ekonomi lokal masyarakat Sitemu sejak puluhan tahun yang lalu secara turun temurun. Kondisi kemiskinan tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat yang juga berkaitan dengan usaha ternak itik.

Kemiskinan pada peternak itik bisa diketahui dari pendapatan rata-rata peternak yang masih rendah, aset yang dimiliki berupa tanah dan ternak itik jumlahnya kecil, produktivitas peternak yang rendah karena beternak merupakan sumber pendapatan utama keluarga dan produktivitas ternaknya yang rendah disebabkan teknik pemeliharaan yang masih sederhana, permodalan yang kecil karena berasal dari modal pribadi serta keterampilan (*skill*) yang rendah/terbatas.

Dari kondisi tersebut, perlu kiranya untuk memberdayakan peternak miskin dengan: *Pertama*, memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan; *Kedua*, memberikan kemampuan/daya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik berupa fisik (rumah yang layak), ekonomi (usaha yang menguntungkan) dan sosial (bisa berinteraksi dengan masyarakat).

Dengan adanya pemberdayaan peternak miskin diharapkan bisa berdampak pada keberdayaan kelompok tani, karena dinamika dari kelompok tani sangat dipengaruhi oleh aktivitas para anggota kelompok. Apabila anggota kelompok tani bisa berdaya tentunya akan semakin memperkuat kelompok tani didalam kelangsungan usaha yang dijalankan.

Keberdayaan kelompok tani ditandai dari kemampuan kelompok mengakses modal dari lembaga pelayanan publik maupun lembaga keuangan. Dengan demikian akses terhadap kebutuhan anggota bisa dipenuhi melalui usaha simpan pinjam yang dikelola oleh kelompok tani untuk menghindari ikatan dari pengijon/tengkulak.

Selain dari itu, keberdayaan kelompok tani bisa dilihat dari partisipasi anggota di dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi anggota di dalam kelompok pada akhirnya akan berkembang kepada partisipasi anggota di dalam lingkungan

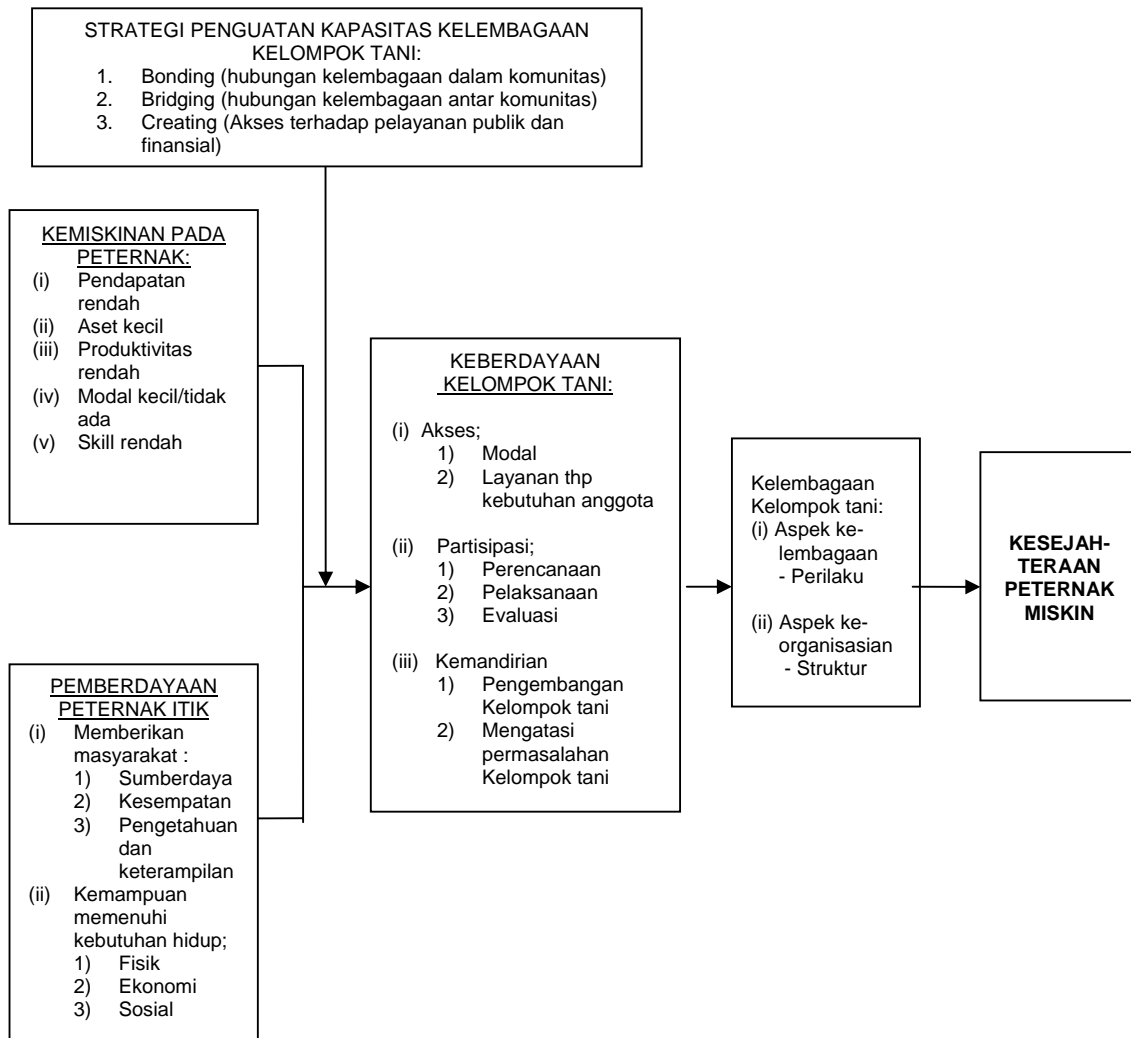
dimana mereka tinggal. Hasil akhir dari keberdayaan kelompok tani adalah meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan meningkatnya usaha tani/ternak yang dilakukan oleh anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok dan makin luasnya interaksi kelompok tani dengan kelompok lainnya di dalam masyarakat. Dengan demikian di dalam mengembangkan kelompok tidak semata-mata bergantung dari bantuan pemerintah serta bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok.

Salah satu upaya untuk pengembangan masyarakat peternak yang bisa mempengaruhi keberdayaan peternak miskin tersebut adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani yang dibentuk dari, oleh dan untuk peternak dalam wilayah desa. Penguatan kelembagaan kelompok tani menurut pengkaji adalah penting dimana kelompok tani merupakan wadah dari para peternak untuk berinteraksi dan bertukar pengalaman di dalam menghadapi permasalahan usaha. Selain itu dengan berkelompok bisa menghimpun modal, baik dari anggota maupun modal pinjaman, dan bisa memasarkan produk ke luar kelompok serta bisa menjalin kemitraan (*partnership*) yang akan meningkatkan posisi tawar peternak dalam menentukan harga, sehingga peternak tidak selalu dirugikan. Melalui pertemuan kelompok yang dilaksanakan secara rutin bisa dibangun nilai-nilai baru yang bisa meningkatkan kinerja kelompok tani dan mentalitas peternak.

Dengan dilaksanakannya program partisipatif, kondisi yang diharapkan adalah: *Pertama*, terciptanya peternak yang berdaya yaitu; meningkatnya pengetahuan dan keterampilan, meningkatnya permodalan usaha, semakin luas kesempatan bekerja dan berusaha, semakin aktif dalam kegiatan pembangunan, meningkatnya interaksi dan semakin luas jaringan sosial. *Kedua*, prinsip partisipatif di dalam kegiatan Kelompok tani yang ditandai dengan keterlibatan semua anggota dan hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan dan mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja) kelompok tani. Jika kondisi demikian dapat dicapai maka keberdayaan komunitas peternak itik diharapkan akan memiliki dampak positif terhadap kemandirian kelompok tani ternak.

Dengan demikian maka proses keswadayaan untuk dapat saling memberdayakan antara komunitas peternak itik miskin dan kelompok tani merupakan tujuan ideal yang ingin dicapai oleh program penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani ternak itik.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Kajian Pemberdayaan Peternak Miskin Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok tani

3.2 Tipe Kajian Komunitas

Kajian Pengembangan Masyarakat ini bersifat kajian terapan untuk mengetahui penyebab kemiskinan yang terjadi pada komunitas peternak itik di Desa Sitemu, merumuskan program secara partisipatif dan intervensi penanganan masalah kemiskinan yang terjadi di komunitas Sitemu, Kabupaten Pemalang. Strategi kajian menggunakan studi kasus dan difokuskan untuk mengetahui penyebab ketidakberdayaan peternak miskin. Langkah selanjutnya dengan mengkaji sejauh mana peran kelembagaan yang ada di Desa Sitemu terhadap keberdayaan peternak miskin.

Melalui penguatan kapasitas kelembagaan, dibangun kembali proses dan implikasinya pada program untuk pengembangan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif bersama komunitas.

Landasan pengembangan masyarakat adalah berdasarkan pengertian yang dikembangkan oleh komunitas itu sendiri di sekitar peristiwa dalam kehidupan peternak itik sehari-hari. Dengan demikian program pengembangan masyarakat yang dihasilkan pada kajian ini didasarkan pada kebutuhan yang dikehendaki oleh komunitas, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Tipe pendekatan kajian komunitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan "obyektif-mikro". Kajian diarahkan pada pola perilaku, tindakan, dan interaksi sosial yang terjadi pada komunitas peternak itik miskin dalam aktivitas beternak sehari-hari.

3.3 Lokasi dan Komunitas Subyek Kajian

Kriteria pemilihan lokasi Kajian Pemberdayaan Masyarakat untuk diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan salah satu desa penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) melalui kelompok usaha ternak itik di Desa Sitemu Kabupaten Pemalang;
- b. Desa Sitemu pada tahun 1993 termasuk dalam kriteria desa tertinggal. Sedangkan jumlah KK miskin yang ada sesuai data terakhir (BPS) sebanyak 340 KK (35%) dari 977 KK yang ada. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani/peternak itik;

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengamatan lapangan dilakukan selama dua bulan, meliputi pengamatan terhadap; lingkungan fisik Desa Sitemu, wawancara mendalam dengan peternak itik miskin; dan pengurus Kelompok Tani Ternak Itik Sri Rejeki, serta aparat pemerintah yang memiliki peran terhadap program pengembangan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan terhadap peternak miskin untuk memahami kehidupan, pengalaman dan situasi sosial. Wawancara mendalam dilakukan secara informal. Adapun terhadap pengurus kelompok tani, serta petugas yang memiliki peran terhadap program pengembangan peternak itik dilakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka mengenai manfaat berkelompok, permasalahan yang sedang dihadapi, dan harapan-harapan yang dimiliki berkaitan dengan usaha ternak itik yang dilakukan.

Diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussion* (FGD) dilakukan untuk proses pengumpulan informasi mengenai permasalahan tertentu yang sangat spesifik yang dihadapi oleh peternak. Tujuan dari FGD adalah untuk mencari masukan mengenai suatu masalah tanpa berniat untuk mengambil keputusan mengenai langkah-langkah penyelesaiannya. FGD pada dasarnya adalah wawancara kelompok yang dipandu oleh seorang moderator, berdasarkan topik diskusi yang merupakan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelusuran Dokumen

Penelusuran dokumen dilakukan terhadap data potensi desa dan kependudukan. Selain itu juga dokumen-dokumen yang ada pada pelaksana program pemberdayaan petani/peternak di Dinas Pertanian dan Peternakan serta Kantor Bappeda Kabupaten Pematang Jaya. Penelusuran juga dilakukan terhadap dokumen yang dimiliki oleh kelompok tani serta perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok tani Ternak Itik Sri Rejeki selama lima tahun terakhir yang dilakukan dengan menggunakan teknik

dokumentasi. Kesemuanya dilakukan untuk menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan kajian.

c. Pengamatan Berperanserta

Teknik ini digunakan karena membuka kemungkinan untuk : (a) melihat, merasakan, memaknai dunia, peristiwa dan gejala sosial menurut subyek penelitian, dan (b) pembentukan pengetahuan bersama (intersubyektifitas). Untuk keperluan efisiensi dan efektifitas, maka perlu pembatasan sasaran pengamatan dan membangun kerangka pemikiran sebagai pengarah bagi proses pengumpulan data.

3.6 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara terus-menerus selama praktek kajian pengembangan masyarakat berlangsung. Proses ini dengan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan secara siklikal.

3.7 Penyusunan Rencana Aksi

Penyusunan strategi dan rencana aksi program pengembangan masyarakat yang akan dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kelembagaan. Pendekatan kelembagaan melalui tiga aras kapital sosial di dalam komunitas. Ketiga aras tersebut adalah: “Bonding”, “Bridging” dan “Creating” dalam konteks otonomi daerah.

Dengan demikian maka diperlukan kemampuan dari anggota kelompok tani dan pengembang masyarakat untuk mendiagnosis kebijakan-kebijakan di tingkat lokal (kabupaten) dan nasional yang bisa mendukung tercapainya program pemberdayaan peternak miskin dengan selalu menjalin komunikasi dengan *stakeholder* yang ada baik dari sektor pemerintah (*public sector*), sektor swasta (*private sector*) serta masyarakat (*participatory sector*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam pengembangan peternak itik adalah menolong diri sendiri (*self-help*), masyarakat menjadi partisipan yang aktif dalam proses pembangunan , agen-agen pembangunan menjadi fasilitator.

Metode yang digunakan untuk mengadakan komunikasi dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh peternak dan kelompok tani adalah dengan

metode diskusi kelompok. Tahap berikutnya dengan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD). Partisipan dalam diskusi kelompok terfokus adalah: Kepala Desa, Ketua LPMD, Pengurus Kelompok Tani dan anggota yang dipilih, serta unsur dari Dinas Pertanian dan Peternakan yang membidangi pembinaan kelompok tani dan produksi peternakan. Dengan demikian maka dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai pengupaya, penilai dan penikmat hasil program tersebut.

IV. PETA SOSIAL DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

4.1 Profil komunitas dan Kelembagaan

Desa Sitemu merupakan tipologi desa pertanian, di mana memiliki luas wilayah 303, 933 Ha dengan ketinggian delapan meter di atas permukaan laut. Secara administratif wilayah Desa Sitemu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serang Kecamatan Petarukan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jrasah Kecamatan Taman, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sokawangi Kecamatan Taman dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan.

Desa Sitemu sendiri terbagi dalam empat dusun, yaitu Dusun Penanggalan, Dusun Guci, Dusun Karangwuluh serta Dusun Sitemu. Letak dua dusun yang ada, terpisah oleh areal persawahan yaitu Dusun Karangwuluh dan Dusun Guci sedangkan dua dusun lainnya dibatasi oleh jalan desa yaitu Dusun Sitemu dan Dusun Penanggalan. Adapun keberadaan komunitas peternak itik sebagian besar terkonsentrasi di Dusun Penanggalan dan sebagian kecil lainnya tersebar di ketiga dusun yang ada.

Kondisi jalan yang menghubungkan satu dusun dengan dusun yang lain adalah jalan beraspal yang bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Jalan utama desa adalah jalan beraspal hotmix yang dilewati oleh angkutan pedesaan yang menghubungkan dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Taman dengan Kecamatan Petarukan.

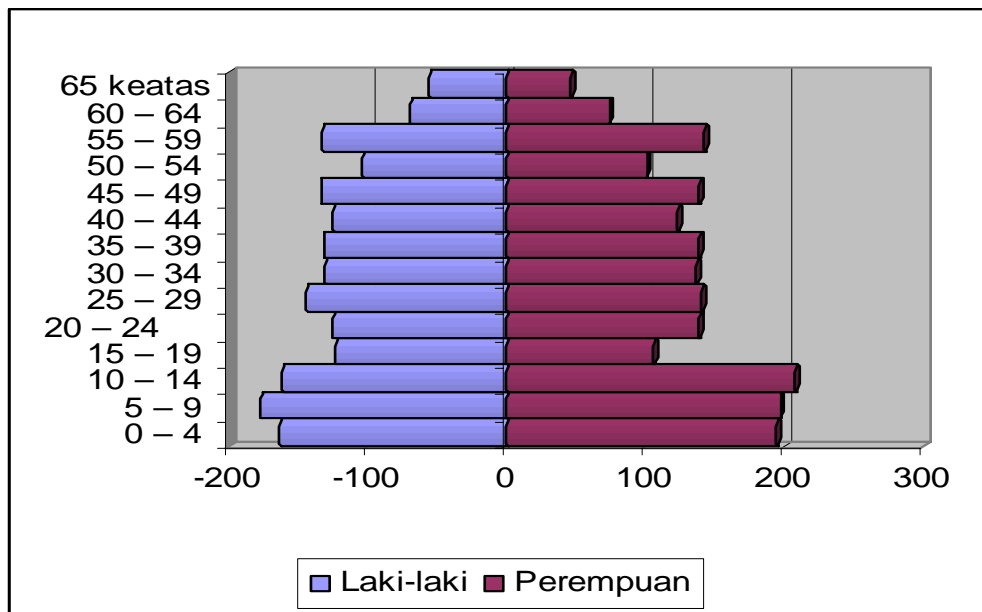
Desa Sitemu memiliki jumlah penduduk 3.668 jiwa, terdiri atas laki-laki 1783 jiwa dan perempuan 1885; terdapat 977 KK, dengan mata pencaharian penduduknya 139 KK (petani tanaman pangan), 114 KK (pedagang), 32 KK (peternak itik), 421 KK (buruh tani), 29 KK (buruh ternak), 54 KK (buruh nelayan), 38 KK (buruh perdagangan), 79 KK (buruh bangunan), 21 KK (PNS), 20 KK (jasa), 30 KK (lain-lain). Dari jumlah KK tersebut, ada 340 KK yang tergolong KK miskin (BPS Kabupaten Pemalang-Jawa Tengah, 2006). Kondisi ekonomi peternak itik yang ada, 27 KK (peternak) termasuk dalam kriteria miskin, dan hanya 5 KK peternak itik yang tergolong tidak miskin. Sebagai pembandingan jumlah peternak itik yang ada di Desa Sitemu pada tahun 2004 berjumlah 73 peternak dan terus berkurang setiap tahun .

Adapun komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Sitemu berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Golongan Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	164	195	359
2	5 – 9	178	197	375
3	10 – 14	162	208	370
4	15 – 19	124	106	230
5	20 – 24	125	139	264
6	25 – 29	145	140	285
7	30 – 34	131	137	268
8	35 – 39	132	139	271
9	40 – 44	126	123	249
10	45 – 49	134	138	272
11	50 – 54	104	101	205
12	55 – 59	133	142	275
13	60 – 64	69	74	143
14	65 keatas	56	46	102
	Jumlah	1783	1885	3668

Sumber : Data Potensi Desa Sitemu Tahun 2006



Gambar 2 Piramida Penduduk Desa Sitemu berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006

Mata pencaharian penduduk Desa Sitemu beragam, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Komposisi Penduduk Desa Sitemu Berdasarkan Mata Pencaharian

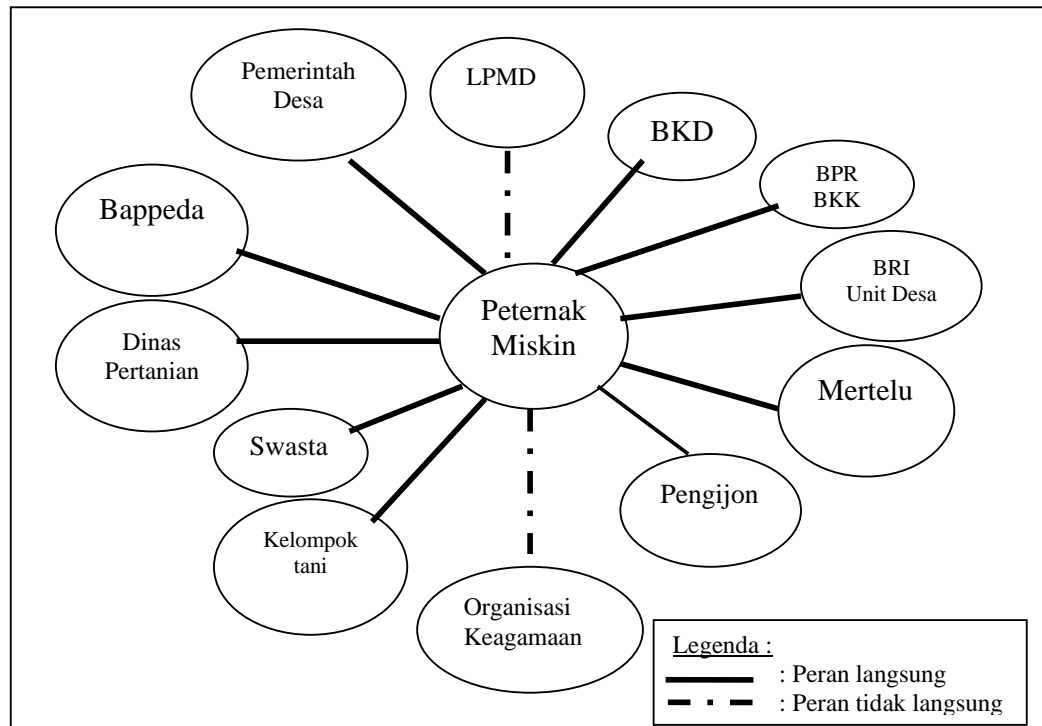
No	Mata Pencaharian	Jumlah (KK)	Prosentase
1	Buruh:		
	- tani tanaman pangan	421	43,39
	- tani ternak itik	29	2,96
	- nelayan	54	5,52
	- perdagangan	38	3,88
	- bangunan	79	8,08
2	Pedagang	114	11,60
3	Petani		
	- tanaman pangan	139	14,20
	- peternak	32	3,30
4	Nelayan	-	-
5	PNS	21	2,10
6	Tukang Becak	7	0,70
7	Guru Swasta	3	0,30
8	Bidan	1	0,10
9	Penjahit	1	0,10
10	Montir	4	0,40
11	Sopir	4	0,40
12	Lain-lain	30	3,07
	J u m l a h	977	100,00

Sumber : Data Potensi Desa Sitemu, Tahun 2006

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Sitemu, 63,83 % bekerja sebagai buruh tani tanaman pangan, tani ternak itik, industri rumah tangga serta bangunan.

Dinamika kelembagaan dan organisasi yang ada di Desa Sitemu dapat dilihat dari analisis diagram venn yang menunjukkan kedekatan peran masing-masing kelembagaan dalam melaksanakan aktivitasnya pada kehidupan masyarakat. Alat kaji ini mencatat terdapat berbagai kelembagaan yang ada, dapat dikelompokkan dari sejarah terbentuknya kedalam dua bagian, yaitu: kelembagaan intervensi dan kelembagaan swakarsa/asli. Kelembagaan intervensi antara lain adalah: Pemerintah Desa Sitemu, LPMD, BPD, Badan Kredit Desa (BKD), Unit Pelayanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK, Sekolah, Posyandu, Polindes, PKK, Karangtaruna, Kelompok tani, Poskamling, Perusahaan Swasta. Sedangkan kelembagaan-kelembagaan swakarsa asli antara lain adalah: *Mertelu*, *Pengijon*, Rukun Kematian, dan Remaja Masjid.

Untuk memberikan gambaran berkaitan dengan kelembagaan yang ada di Desa Sitemu dalam kaitannya dengan pemberdayaan peternak itik miskin, dapat dilihat dalam Gambar 3.



Gambar 3 Diagram Venn kelembagaan yang ada di Desa Sitemu, Tahun 2006

KETERANGAN :

Ukuran gambar menunjukkan besar dan kecilnya peran kelembagaan terhadap peternak miskin.

Kelembagaan-kelembagaan intervensi pemerintah seperti Pemerintah Desa memiliki peran langsung di dalam memberdayakan peternak miskin. Peran tersebut adalah dalam memberikan fasilitas penggunaan tanah-tanah desa yang tidak produktif untuk kawasan usaha ternak itik karena lahan untuk kandang ternak yang dimiliki peternak miskin terbatas akibat terdesak oleh pemukiman penduduk.

Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memiliki peran meskipun tidak langsung terhadap peternak miskin karena kelembagaan ini memiliki peran di dalam memberdayakan masyarakat desa. LPMD berperan sebagai merencanakan program-program pemberdayaan yang nantinya diusulkan ke tingkat kabupaten. Selain itu ada beberapa program/proyek dari

pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dimana LMPD menjadi pelaksana kegiatan proyek tersebut.

Bappeda sebagai unsur perencana pembangunan di daerah memiliki peran cukup besar di dalam memberdayakan peternak. Melalui tahapan perencanaan program pembangunan yang dimulai dari desa selanjutnya di tingkat kecamatan dan pada akhirnya sampai di tingkat kabupaten. Bappeda memiliki peran dalam menentukan prioritas pembangunan pedesaan yang akan ditetapkan di tingkat kabupaten.

Dinas Pertanian sebagai kelembagaan yang secara langsung membina petani juga punya peran yang sangat besar di dalam memberdayakan peternak miskin. Program-program pemberdayaan petani yang berasal dari pusat dilaksanakan melalui kelembagaan ini. Di samping itu program pemberdayaan petani/peternak yang berasal dari daerah diusulkan melalui Dinas Pertanian.

Badan Kredit Desa (BKD) sebagai salah satu kelembagaan keuangan yang ada di desa memiliki peran langsung di dalam membantu permodalan peternak miskin untuk mengembangkan usahanya meskipun dana yang dimiliki oleh BKD masih kecil tetapi keberadaan kelembagaan ini dekat dengan lokasi peternak.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK memiliki unit pelayanan kredit di Desa Sitemu juga memiliki peran yang besar di dalam membantu permodalan untuk usaha peternak miskin, karena BPR BKK memiliki dana yang cukup besar untuk memberikan pinjaman kepada para peternak itik di Desa Sitemu. Akan tetapi jaminan kredit berupa sertifikat/BPKB kendaraan serta suku bunga pinjaman yang masih tinggi menyebabkan peternak miskin sulit untuk mengakses kelembagaan ini.

BRI Unit Desa memiliki peran yang cukup besar dalam memberdayakan peternak. Sebagai kelembagaan keuangan yang dekat dengan petani dan punya komitmen untuk memberikan kredit usaha di pedesaan termasuk di dalamnya peternak itik. Peternak itik di Desa Sitemu sebagian mendapatkan modal dari kelembagaan ini.

Kelompok tani memiliki peran yang besar di dalam memberdayakan peternak miskin, karena tujuan dibentuknya kelembagaan ini adalah untuk mensejahterakan anggota. Kelompok tani merupakan wadah dari para peternak itik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi peternak, memasarkan telur dan sarana untuk mengakses pinjaman modal dari dinas/instansi pelaksana program penguatan modal kelompok.

Keberadaan kelembagaan tradisional seperti *Mertelu* yang hidup dan berkembang di komunitas peternak itik di Desa Sitemu, memiliki peran yang sangat besar di dalam memberdayakan peternak miskin. Oleh karena di dalam *mertelu* ada pola hubungan antara para pemilik modal (*patron*) dengan para peternak miskin (*client*) yang hanya memiliki keterampilan (*human capital*) beternak itik.

Adapun kelembagaan swasta yang ada di Desa Sitemu adalah perusahaan penggilingan padi (*rice mill*) yang memberikan fasilitas kepada peternak miskin dalam menyediakan salah satu bahan pakan untuk ternak itik seperti bekatul. Para pemilik penggilingan padi memberikan fasilitas kepada peternak di sekitar tempat usaha untuk mendapatkan bekatul.

Kelembagaan tradisional seperti *pengijon* keberadaannya sangat dekat dengan peternak miskin dalam kehidupan sehari-hari peternak. Pengijon memberikan pinjaman kepada peternak, sebagai jaminan untuk melunasi dengan cara mengambil telur dengan harga yang ditentukan oleh pemberi pinjaman. Peternak itik dengan kondisi keterbatasannya tidak bisa berbuat banyak karena ikatan pemasaran telur tersebut sudah berlangsung lama.

Keberadaan organisasi keagamaan memiliki peran meskipun tidak langsung di dalam memberdayakan peternak itik. Kelembagaan keagamaan seperti Kelompok Tahlil, kelompok Yasinan banyak diikuti oleh peternak itik. Melalui kelembagaan ini tokoh agama yang ada bisa memberikan nasehat berkaitan dengan perlunya ketekunan, kesabaran dan kejujuran di dalam menjalankan usaha ternak itik dan tidak konsumtif di dalam menggunakan keuntungan yang diperoleh dari usaha ternaknya.

Hubungan antara masyarakat Desa Sitemu dengan ekosistem setempat dapat dilihat dari bagaimana pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di lingkungannya. Desa Sitemu sebagai desa agraris dimana wilayah desanya dikelilingi oleh persawahan yang luas dan subur dengan sistem irigasi yang tertata dengan baik. Hubungan antara manusia dengan ekosistem yang ada berupa agroekosistem tanaman pangan dan peternakan.

Sumberdaya lokal yang ada di Desa Sitemu antara lain :

- 1). Lahan

Wilayah Desa Sitemu memiliki luas lahan pertanian 131,244 Ha atau 78,55% dari luas lahan yang ada. Sedangkan jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian sebanyak 583 RTP (rumah tangga pertanian). Lahan

pertanian yang ada dimanfaatkan untuk tanaman padi, sayur-sayuran dan palawija. Dengan luas lahan yang ada dan produksi padi rata-rata enam ton/ha serta dapat ditanami padi dua kali dalam setahun akan sangat mudah untuk mendapatkan limbah pertanian seperti bekatul, dan menir untuk pakan ternak itik dengan harga yang terjangkau. Sumberdaya yang ada tersebut memungkinkan masyarakat untuk beternak itik karena tersedianya lahan yang cukup luas untuk menggembalakan ternak itik pada saat musim panen.

2). Tenaga Kerja

Tenaga kerja terampil dan terdidik merupakan salah satu modal untuk mengembangkan masyarakat. Jumlah usia kerja (15-64) penduduk Desa Sitemu sebanyak 2.462 orang atau 67,12%. Dari penduduk usia kerja tersebut, sebagian besar merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik yang bekerja sebagai buruh tani/ternak, buruh bangunan dan buruh pada usaha perdagangan baik di Desa Sitemu maupun di kota. Buruh ternak merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik tetapi memiliki keterampilan di dalam beternak itik. Keterampilan yang dimiliki diantaranya: mampu menyusun ransum ternak itik pada semua kelompok umur ternak dan mampu menyeleksi ternak itik yang sudah tidak produktif untuk segera diafkir.

3). Modal

Modal terkait dengan modal ekonomi dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Modal ekonomi menyangkut asset produksi yang dimiliki oleh para peternak berupa ternak itik dan keterampilan beternak (*human capital*) yang dimiliki. Modal sosial (*social capital*) yang dimiliki berupa kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh peternak itik sehingga masuknya investasi untuk usaha ternak itik dari luar Desa Sitemu dengan pola *mertelu*. Akan tetapi kondisi terakhir kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal semakin berkurang akibat adanya wabah flu burung dan menurunnya nilai-nilai yang ada di kalangan peternak itik.

4). Kelompok-kelompok Usaha

Kelompok-kelompok usaha yang ada di Desa Sitemu berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di komunitas peternak itik di Desa Sitemu. Adapun kelompok usaha yang berkaitan dengan ternak itik diantaranya adalah: usaha pengolahan telur asin (tiga rumah tangga), usaha perdagangan telur itik/pedagang pengumpul (empat rumah tangga), usaha penjualan pakan ternak

(bekatul dan nasi aking) dua rumah tangga dan usaha penjualan itik potong (lima rumah tangga).

4.2 Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK)

Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) adalah merupakan salah satu program pengembangan ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya melalui pengembangan agribisnis baik pada usaha di bidang budidaya maupun pengolahan hasil komoditas pertanian dalam arti luas termasuk usaha di bidang perikanan.

Orientasi pemberdayaan masyarakat dari aspek ekonomi ini adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumberdaya alam, sumberdaya modal, teknologi, dan pasar. Ekonomi Kerakyatan (EK) adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat, sesuai dengan Pancasila (sila ke empat) dan UUD 45 (pasal 33) dan dalam ekonomi kerakyatan rakyat berpartisipasi penuh dan demokratis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi kepada mekanisme pasar.

Pengembangan ekonomi kerakyatan pada hakekatnya adalah mengembangkan ekonomi masyarakat kecil seperti masyarakat petani, pengusaha kecil dan industri kecil. Karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Pematang Jaya mengandalkan kehidupannya pada sektor pertanian, maka melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) ini menitikberatkan pada pengembangan usaha agribisnis dalam bentuk pemberian pinjaman modal bergulir dan pendampingan. Maksud gagasan ekonomi kerakyatan adalah sebagai reaksi terhadap situasi perekonomian saat ini, yakni untuk menggugat dominasi ekonomi para konglomerat. Disamping itu juga untuk menggugat semua pihak agar menaruh perhatian terhadap nasib perekonomian rakyat.

Adapun penyelenggara kegiatan PPEK ini adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pematang Jaya. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan sub-sub dinas yang ada di Dinas Pertanian seperti Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Sub Dinas Peternakan, Sub Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Kelautan dengan melibatkan unsur masyarakat yang ada dalam MitraPEK

sebagai pelaksana survey kelayakan usaha bersama dinas-dinas lingkup pertanian dengan membentuk pokja PPEK.

Adapun sumber biaya berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pemalang Tahun 2003 sebesar 1,880 Milyar rupiah. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan usaha ekonomi di bidang pertanian dan perikanan skala kecil yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Golongan partisipan dalam kegiatan PPEK adalah unsur masyarakat yang ada dalam kelembagaan MitraPEK.

Tujuan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang adalah: membantu percepatan pemulihan ekonomi, menggerakkan ekonomi pedesaan, memberdayakan masyarakat petani, menciptakan kemitraan antara komponen masyarakat dengan pemerintah, memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan, menciptakan keterpaduan pelaksanaan program, meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan ketahanan pangan.

Adapun sasaran pokok Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) adalah pelaku ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian dalam arti luas, baik perorangan maupun kelompok serta kegiatan usaha yang mendukung agribisnis.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan PPEK adalah :

- (a) Pengelolaan dana oleh petani mitra dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*);
- (b) Mencerminkan kebutuhan masyarakat petani yang sesungguhnya, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*);
- (c) Kesiambungan kegiatan secara lestari (*sustainable*);
- (d) Pengelolaan dana dan pelestarian hasil digulirkan dan dikembangkan kepada masyarakat petani dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*) dan
- (e) Terciptanya kemitraan (*partnership*).

Ketentuan dasar dalam memberikan pinjaman modal bergulir PPEK kepada penerima pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman diberikan untuk pengembangan usaha pertanian, peternakan, perikanan, serta perkebunan;
2. Besarnya pinjaman maksimal 10 juta rupiah per orang;
3. Apabila kelompok usaha maksimal 30 juta rupiah;

4. Besarnya jasa/bunga pinjaman adalah enam persen setahun (0,5 persen per bulan) tetap;
5. Mempunyai agunan/jaminan baik untuk perorangan maupun kelompok;
6. Jangka waktu pinjaman paling lama dua tahun;
7. Waktu angsuran bisa setiap bulan, dua bulan, tiga bulan, atau empat bulan sekali tergantung jenis usahanya.

4.2.1 Pengorganisasian PPEK

Dalam rangka pengelolaan kegiatan PPEK dibentuk suatu sistem organisasi manajemen pengelolaan dan tim pembina yang terdiri dari: Tim Koordinasi Pengelolaan Program (TKPP), Pemimpin Proyek (Pimpro), Koordinator Pelaksana Lapangan (KPL), MitraPPEK, dan Fasilitator Kegiatan (FK).
A Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP).

TKPP bertugas mengendalikan dan membina pelaksanaan kegiatan. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis serta Sekretariat. Sekretariat meliputi unsur-unsur: Bappeda selaku Ketua Tim, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bagian Perekonomian, Bagian Keuangan dan Dinas /Kantor/Bagian terkait lainnya.

Tugas dan Fungsi TKPP Kabupaten meliputi:

1) Tim Pengarah :

Tim pengarah bertugas: 1) membuat kebijakan umum, menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) PPEK seperti perangkat aturan lainnya; 2) mengkoordinasikan dan mensinergikan semua komponen program mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan serta upaya-upaya pelestarian program; 3) membina dan mengarahkan pengelolaan program agar berjalan secara baik, berdaya dan berhasil guna; 4) memantau kemajuan dan perkembangan pelaksanaan program dan 5) bertanggungjawab atas kelancaran dan keberhasilan program.

2) Tim Teknis PPEK :

Tim teknis bertugas: 1) menyusun petunjuk pelaksanaan tambahan berdasarkan arah kebijaksanaan program di tingkat kabupaten; 2) melakukan diseminasi, sosialisasi kebijaksanaan dan orientasi operasional program kepada para pelaku program PPEK; 3) melakukan pengkajian dan seleksi setiap usulan dan hasil survey kelayakan; 4) menentukan dan menetapkan penerima pinjaman modal bergulir.

3) Sekretariat TKPP :

Sekretariat TKPP mempunyai tugas dan tanggungjawab:1) melakukan kegiatan untuk menunjang koordinasi pengelolaan program; 2) memberikan dukungan untuk kegiatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi; 3) memberikan dukungan administrasi kepada TKPP; 4) mengumpulkan data, informasi dan dokumentasi semua kegiatan program; 5) melaksanakan pengelolaan kelestarian kegiatan.

B. Pemimpin Proyek (Pimpro)

Untuk membantu TKPP dalam pelaksanaan proyek, serta menyiapkan, melaksanakan dan memantau seluruh administrasi kegiatan proyek diadakan pimpro dan bendaharawan proyek.

Pada tahap pelestarian proyek, pimpro berperan sebagai Ketua Sekretariat. Adapun fungsi /tugas Pemimpin Proyek: 1) membantu TKPP dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya, 2) melakukan pengadaan Fasilitator Kegiatan (FK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) merekrut tenaga-tenaga pengelola MitraPEK sesuai kebutuhan, 4) melakukan pengamatan dan pengawasan atas perkembangan pelaksanaan proyek, 5) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima, 6) menyiapkan administrasi keuangan untuk penarikan Bantuan Operasional dan Pengendalian (BOP), Bantuan Manajemen (BM), dan Dana Pinjaman Bergulir.

C. Koordinator Pelaksana Lapangan (KPL)

KPL terdiri dari Mantri Tani, Petugas Peternakan Kecamatan, Petugas Perikanan Kecamatan, yang karena jabatannya difungsikan sebagai nara sumber untuk dimintakan bantuannya guna memberikan masukan-masukan informasi, saran dan pendapat serta pertimbangan tentang usulan/permohonan pinjaman dari petani/petambak/peternak dan pelaku agrobisnis berskala kecil/menengah yang berada di wilayah kerjanya (kecamatan), sesuai dengan kewenangan tugas kedinasan masing-masing, yaitu Mantri Tani untuk usulan dari kelompok sub sektor tanaman pangan, Petugas Peternakan Kecamatan untuk sub sektor peternakan dan Petugas Perikanan Kecamatan untuk sub sektor perikanan. Oleh karena itu survey/studi kelayakan yang dilakukan oleh FK dari masing-masing sub sektor harus diketahui dahulu oleh KPL, sebagai syarat pengajuan penyeleksian usulan kepada Tim Teknis TKPP PPEK.

D. MitraPEK (Mitra Pengembangan Ekonomi Kerakyatan)

Untuk membantu TKPP dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir, serta melestarikan kegiatan secara berkesinambungan untuk menjembatani antara pemerintah kabupaten dan pelaku ekonomi kerakyatan (dalam hal ini adalah petani, petambak dan peternak yang menjadi mitra) maka diperlukan kelembagaan pengelola yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Pematang Jaya. Sehingga keberadaan kelembagaan ini bersifat lestari. MitraPEK bertanggungjawab kepada Bupati melalui TKPP dan bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian TKPP. Adapun pengelola MitraPEK direkrut dari tenaga masyarakat yang potensial, dengan sistem kontrak kerja tahunan. Fungsi MitraPEK adalah mengembangkan kegiatan pinjaman dana bergulir, kemitraan dan pendampingan untuk mendukung PPEK. Keberadaan MitraPEK tidak bersifat *profit oriented*, tetapi semata-mata membantu tugas dan fungsi TKPP kabupaten dalam memfasilitasi serta upaya membantu meringankan beban kepada petani/peternak/petambak dan pelaku agribisnis berskala kecil/menengah dalam bentuk pinjaman lunak, sebagai perwujudan kepedulian Pemerintah Daerah kepada pelaku ekonomi kerakyatan

Secara rinci tugas dan fungsi MitraPEK adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima dan menyalurkan dana pinjaman bergulir PPEK;
- 2) Mencatat, mendokumentasikan dan membukukan dana pinjaman bergulir PPEK;
- 3) Melaporkan perkembangan kegiatan PPEK kepada TKPP;
- 4) Berperan mengelola dana pinjaman modal bergulir agar berkembang sehingga memperluas jangkauan dan melibatkan banyak petani;
- 5) Membuka rekening kolektif di bank terdekat yang telah ditetapkan;
- 6) Memberikan informasi dan pelayanan kepada petani;
- 7) Melakukan pendampingan dan penagihan kepada mitra dan
- 8) Melaksanakan fungsi-fungsi kelestarian program di bawah pengendalian TKPP.

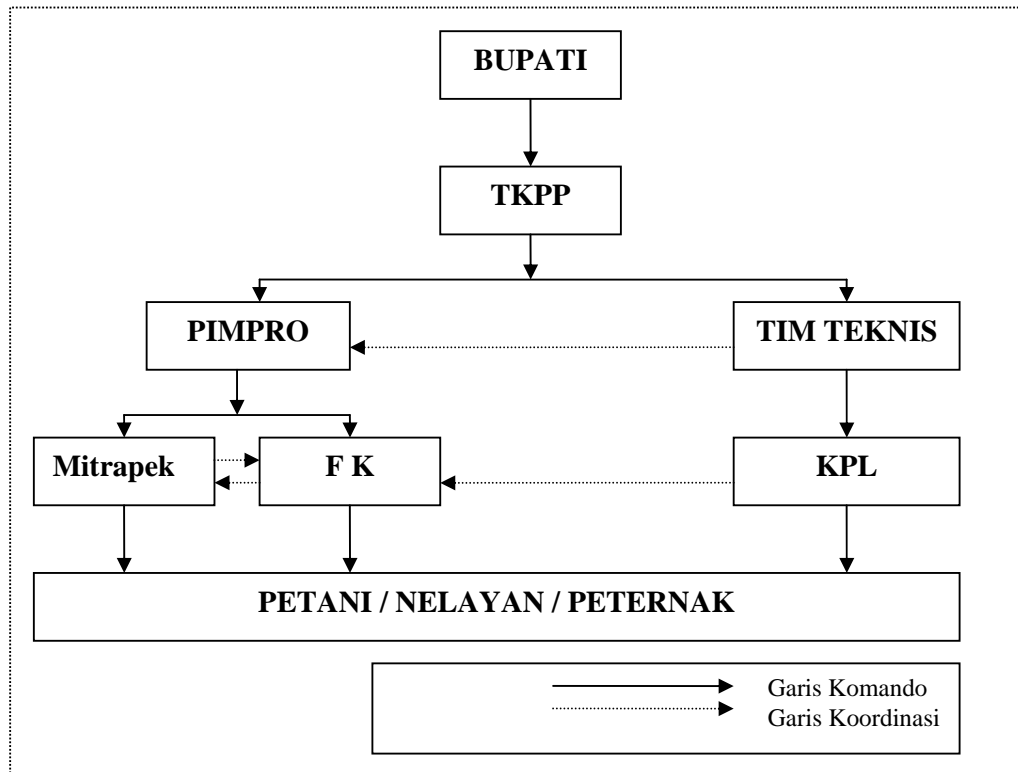
E. Fasilitator Kegiatan (FK)

Fungsi dan tugas FK adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi dan pemberian informasi tentang PPEK di wilayah kerja, baik kepada aparat kecamatan, desa dan masyarakat yang memerlukan informasi;

- 2) Melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan, baik dengan Mantri Tani, Petugas Peternakan Kecamatan, dan Petugas Perikanan Kecamatan;
- 3) Menghimpun permohonan pengajuan pinjaman modal bergulir;
- 4) Melakukan penilaian dan membuat hasil kelayakan usaha;
- 5) Melakukan pendampingan kepada petani mitra.

Struktur Organisasi PPEK pada masa proyek bisa dilihat pada Gambar 3.



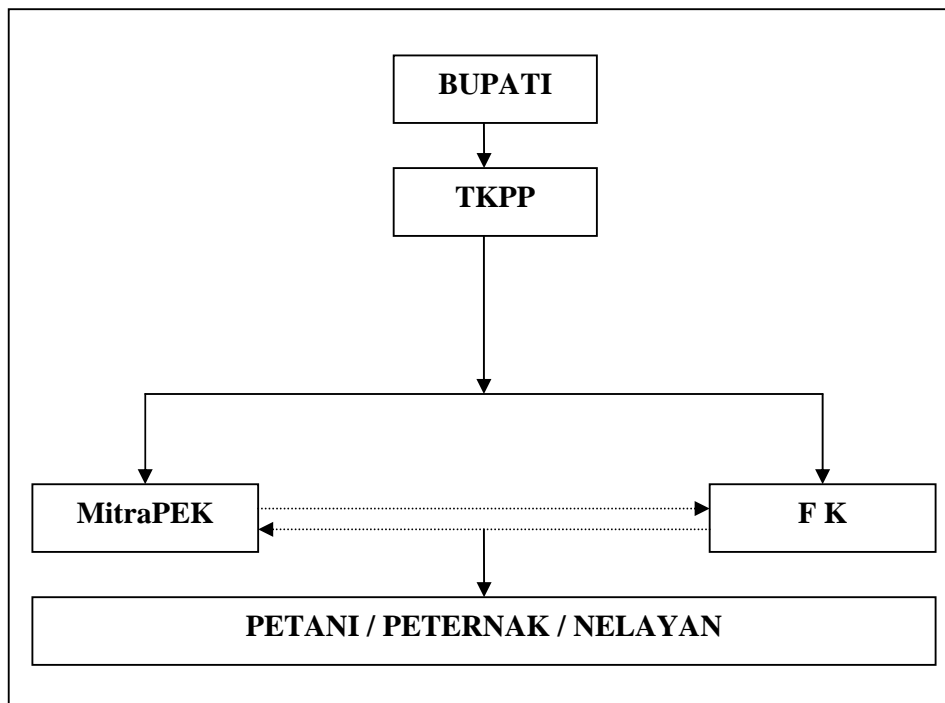
Gambar 4 Struktur Organisasi PPEK Masa Proyek

KETERANGAN:

1. TKPP (Tim Koordniasi Pengelola Program) terdiri dari: Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bagian Perekonomian dan Bagian Keuangan Setda.
2. FK (Fasilitator Kegiatan) terdiri dari: Bidang Ekonomi Bappeda, Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Sub Dinas Peternakan, Sub Dinas Hutbun, Sub Dinas Perikanan, Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengendalian Bappeda.
3. KPL (Kordinator Pelaksana Kegiatan) terdiri dari Mantri Tani, Petugas Peternakan Kecamatan dan Petugas Perikanan Kecamatan.
4. MitraPEK terdiri dari Pimpinan, Unit Keuangan, Unit Administrasi dan Unit Monitoring dan Penagihan.

Dari struktur organisasi tersebut bisa dilihat bahwa petani, nelayan dan peternak adalah sebagai penerima program dari atas. Dengan posisi peternak sebagai penerima program/proyek, maka posisi petani adalah sebagai obyek dari program pemberdayaan. Dengan demikian partisipasi masyarakat penerima proyek (petani, nelayan dan peternak) tidak bisa muncul karena sebatas menerima proyek.

Adapun struktur organisasi PPEK pada pelestarian proyek bisa dilihat pada Gambar 4.



Gambar 5 Struktur Organisasi PPEK pada pelestarian Proyek

KETERANGAN :

1. TKPP (Tim Koordinasi Pengelola Program) terdiri dari:
 - (a) Penanggungjawab Bupati Pematang
 - (b) Tim Pengarah terdiri dari: Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bagian Perekonomian, Bagian Keuangan Setda.
 - (c) Tim Teknis terdiri dari: Bidang Ekonomi Bappeda, Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Sub Dinas Peternakan, Sub Dinas Hutbun, Sub Dinas Perikanan, Kabid. Pendataan, Penelitian dan Pengendalian Bappeda.
 - (d) Sekretariat terdiri dari: Sub Bidang Pertanian Bappeda, Seksi Produksi dan Peningkatan Mutu Peternakan, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, Sub Bagian Pembangunan Perekonomian Rakyat, Sub Bagian Perbendaharaan dan Staf Bappeda Kabupaten Pematang.
2. FK (Fasilitator Kegiatan) terdiri dari: Bidang Ekonomi Bappeda, Subdin Tanaman Pangan, Subdin Peternakan, Subdin Hutbun, Subdin Perikanan dan Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengendalian Bappeda.
3. MitraPEK terdiri dari: Pimpinan, Unit Keuangan, Unit Administrasi dan Unit Monitoring dan Penagihan

4.2.2 Pelaksanaan PPEK

Setelah instrument kegiatan tersusun dan organisasi pelaksana proyek terbentuk maka tahapan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi : sosialisasi dan pemberian informasi, mekanisme pemberian pinjaman bergulir, penetapan penerima dan penentuan besarnya pinjaman dan penandatanganan perjanjian.

1) Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh seluruh pengelola program yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sampai ke penerima manfaat dalam hal ini adalah masyarakat petani, peternak, petambak dan pelaku agribisnis lainnya.

Diseminasi tingkat kabupaten dilakukan melalui koordinasi dinas/instansi terkait atau diantara pengelola program. Pertemuan koordinasi dilakukan secara rutin dan sekaligus sebagai forum evaluasi untuk mengkaji dan menangani munculnya berbagai permasalahan. Untuk memudahkan dan mempercepat pemberian informasi, dilakukan melalui penyediaan leaflet, disamping juga pemberian informasi secara lisan baik yang dilakukan oleh TKPP PPEK, Pimpro, FK dan MitraPEK, bagi semua pihak yang membutuhkan kejelasan program PPEK secara transparan, untuk menghindari mis informasi yang dapat mengganggu suksesnya program PPEK.

2) Mekanisme pemberian pinjaman bergulir

Sesuai kebijakan dalam PPEK bahwa dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha agrisnis adalah pinjaman modal yang diberikan kepada petani/petambak/peternak dan pelaku agribisnis lainnya berskala kecil dan menengah baik secara perorangan maupun kelompok usaha yang harus dikembalikan dan kemudian digulirkan lagi kepada petani/peternak/petambak lainnya sehingga dapat memperluas jangkauan penerima manfaat. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir, ditetapkan langkah-langkah ketentuan atau prosedur yang harus dilalui sebagai berikut :

a. Pengajuan Permohonan Pinjaman

Pengajuan usulan untuk mendapatkan pinjaman modal bergulir dilakukan oleh petani/peternak/petambak baik secara perorangan maupun kelompok dengan cara mengajukan proposal maupun surat permohonan pinjaman

ditujukan kepada Bupati melalui Tim Teknis PPEK dengan mengisi blanco formulir sesuai dengan kondisi sebenarnya serta diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat. Pengajuan permohonan ini dapat disampaikan lewat Sekretariat TKPP, FK, KPL maupun MitraPEK. Proposal maupun Surat Permohonan Pinjaman yang masuk kemudian dihimpun oleh MitraPEK dan diagendakan secara berurutan sesuai tanggal penerimaan serta diinventarisasi untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan survey lapangan/studi kelayakan sesuai urutan waktu penerimaan usulan tanpa terkecuali dan tidak ada perlakuan khusus.

b. Survey lapangan/Studi Kelayakan

Pelaksanaan survey lapangan/studi kelayakan dari setiap usulan baik dalam bentuk proposal maupun surat permohonan dilakukan oleh Fasilitator Kegiatan (FK) dan dapat dibantu oleh MitraPEK. Prinsip-prinsip pelaksanaan survey yang harus diperhatikan adalah :

Objektif, yang berarti memberikan penilaian sesuai dengan kenyataan dan kondisi yang sebenarnya.

Independen, berarti tidak dipengaruhi oleh faktor luar/tekanan pihak lain.

Responsibel, artinya hasil survey dapat dipertanggungjawabkan

Sesuai aspek ekonomi, artinya dilakukan benar-benar untuk keperluan usaha agribisnis dan tidak boleh ada unsur selain ekonomi.

Adapun acuan yang digunakan di dalam pelaksanaan survey lapangan/studikelayakan adalah sebagai berikut:

1) Kelayakan usaha

Suatu usaha dinilai layak untuk mendapatkan pinjaman apabila memenuhi ketentuan: pengelolaan usaha minimal satu tahun, tersedia sumberdaya alam untuk pengembangan usaha, tersedia tenaga kerja untuk pengembangan usaha serta tersedia jasa untuk pengembangan usaha.

2) Kelayakan anggaran

Kelayakan anggaran dari pelaku usaha agribisnis dinilai dari komponen pengeluaran sudah dihitung dan angkanya realistis dan komponen pemasukan sudah dihitung dan angkanya realistis.

3) Berdampak positif bagi masyarakat setempat;

Usaha dikatakan berdampak positif bagi masyarakat apabila: menyerap tenaga kerja setempat, dan memberikan kesempatan berusaha dan

keterkaitan usaha setempat dalam hal penyediaan bahan baku dan pemasaran.

4) Prospek keuntungan

Prospek keuntungan untuk menilai kelayakan usaha dilihat dari adanya potensi pasar, keuntungan yang diperoleh dari pengembangan usaha ekonomi tersebut mencukupi untuk mengembalikan pinjaman beserta jasanya, dan keuntungan yang diperoleh dari pengembangan usaha ekonomi tersebut memberikan tambahan penghasilan bagi petani.

5) Kelayakan lingkungan

Suatu usaha agribisnis dinilai memenuhi kelayakan lingkungan apabila usaha tersebut: bebas polusi/limbah, berdampak pada pelestarian sumberdaya alam, dan ramah lingkungan.

Pada saat melaksanakan survey FK dianjurkan untuk berkoordinasi dengan KPL yaitu Mantri Tani, Petugas Peternakan Kecamatan, Petugas Perikanan Kecamatan sebagai nara sumber untuk dimintai masukan informasi, saran pendapat dan pertimbangan sesuai sub sektor masing-masing dan setiap permohonan di wilayah kerja masing-masing. Karena hasil dari survey lapangan/studi kelayakan yang diterangkan dalam formulir harus diketahui oleh KPL dari masing-masing sub sektor.

c. Penetapan Penerima dan Penentuan Besarnya Pinjaman

Penetapan penerima pinjaman dan penentuan besarnya pinjaman modal bergulir dilakukan oleh Tim Teknis TKPP PPEK. Proses ini dilakukan melalui analisis dan pengkajian dari hasil survey, yang tidak menutup kemungkinan Tim Teknis dapat melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan bila kurang yakin dan ingin mendapatkan kejelasan informasi tentang usulan yang perlu dimantapkan lagi dengan pengamatan langsung oleh Tim Teknis. Proses penetapan dan penentuan besarnya pinjaman bergulir oleh Tim Teknis dilakukan sesuai dengan kewenangan bidang tugas masing-masing anggota Tim Teknis, hal ini dilakukan untuk pendistribusian tugas dan efektivitas tahapan kegiatan ini, karena secara substansial masing-masing sub dinas tentunya memahami potensi, permasalahan dan kebutuhan dari sub sektornya, namun semuanya harus diketahui oleh Ketua Tim Teknis.

Adapun pembagiannya untuk Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Dinas Tanaman Pangan menetapkan kegiatan untuk kegiatan sub sektor tanaman pangan;
- 2) Sub Dinas Peternakan menetapkan sub sektor peternakan;
- 3) Sub Dinas Hutbun menetapkan sub sektor perkebunan dan kehutanan;
- 4) Sub Dinas Perikanan dan Sub Dinas Perairan menetapkan sub sektor perikanan.

Keluaran dari proses penetapan penerima dan penentuan besarnya pinjaman modal bergulir dituangkan dalam berita acara untuk setiap kegiatan yang akan diberi pinjaman modal bergulir dengan mengisi formulir. Kemudian berita acara ini dihimpun oleh Pimpro/Sekretariat TKPP sebagai dasar pembuatan surat perjanjian.

d. Penandatanganan Perjanjian

Surat Perjanjian Pinjaman Modal Bergulir (SPPMB) dibuat sebagaimana formulir yang ditentukan dan dilengkapi dengan daftar rincian kegiatan (DRK), kuitansi dan KTP/kartu pengenal lainnya. Pada saat penandatanganan Perjanjian, peminjam harus menyerahkan agunan berupa surat-surat berharga seperti BPKB, Sertifikat Tanah/rumah dan dibuatkan tanda terima agunan sebagaimana ketentuan. Perjanjian ini adalah mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Setelah proses administrasi penandatanganan Perjanjian dana pinjaman bergulir dapat diberikan kepada peminjam secara langsung maupun dengan cara transfer ke rekening peminjam yang dilakukan oleh Bendaharawan proyek maupun MitraPEK.

e. Pendampingan

Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan kepada mitra tani baik menyangkut penggunaan dana, pendampingan usaha, kendala dan permasalahan maupun pemberian informasi sehingga selalu tercipta komunikasi yang baik.

f. Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk : mengetahui perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan, mengetahui dan membantu memecahkan masalah yang ada baik dalam tahap perencanaan, penyaluran maupun penggunaan dana pinjaman bergulir, memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran

kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan memberikan rekomendasi.

Adapun mekanisme monitoring sesuai waktu yang ditentukan, dilakukan baik pada jalur struktural maupun fungsional, ditujukan untuk tercapainya sasaran-sasaran kegiatan PPEK.

1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program (TKPP)

Monitoring oleh TKPP dengan segala perangkatnya seperti Tim Teknis, dilakukan sesuai waktu yang ditentukan yaitu monitoring reguler, minimal dilakukan dua kali dalam sebulan dan monitoring insidental dilakukan bila ada masalah yang perlu penanganan segera.

2) Fasilitator Kegiatan (FK).

Monitoring secara fungsional dilakukan oleh Fasilitator Kegiatan (FK). Hasil dari monitoring pada masa proyek dievaluasi oleh TKPP untuk menyempurnakan pelaksanaan pada pasca proyek (pelestarian program). Pada pelestarian program, monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh TKPP terutama adalah oleh Sekretariat TKPP PPEK dibantu oleh MitraPEK.

g. Pelaporan

Semua kegiatan PPEK pada masa proyek maupun pada pelestarian program harus dibuat laporannya. Sistem pelaporan PPEK didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan PPEK mulai dari tahap awal sampai tahap pelaksanaan dan pelestarian kegiatan, yang digunakan untuk pengendalian bagi pengelola dan pelaku program dari segala tingkatan mulai dari FK, Pimpro TKPP sampai Bupati.

Untuk kebutuhan pengendalian pelaksanaan dan pembinaan, maka laporan-laporan pelaksanaan setiap kegiatan harus dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan dapat dipercaya demi kelangsungan keberhasilan program secara keseluruhan.

Laporan yang harus dibuat oleh Fasilitator kegiatan (FK) menyangkut seluruh kegiatan proyek yang meliputi: laporan pendahuluan, laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan setiap bulan dan laporan keuangan. Setiap bulan MitraPEK membuat laporan yang disebut laporan bulanan baik pada masa proyek maupun pasca proyek. Laporan yang dibuat meliputi aspek keuangan, kelembagaan dan perkembangan kemitraan. Laporan keuangan dibuat sampai penyusunan neraca dan bersifat akumulatif, sehingga dapat diketahui

perkembangan setiap bulannya termasuk perkembangan jumlah pinjaman modal bergulir. Setiap akhir tahun takwim (akhir bulan Desember) dilakukan tutup buku dan dibuat laporan tahunan.

4.2.3 Pelestarian Program

Pada prinsipnya dana PPEK adalah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya Agung yang harus bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya masyarakat petani/peternak/petambak dan pelaku agribisnis lainnya melalui pinjaman modal bergulir secara berkesinambungan. Dengan demikian PPEK harus berjalan secara lestari.

Tim Koordinasi Pengelola Program (TKPP) Kabupaten berkewajiban mengelola dan mengembangkan PPEK sehingga menjadi program yang benar-benar berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Untuk dapat lebih mengoperasionalkan pelestarian PPEK, Sekretariat TKPP berperan aktif mengimplementasikan seluruh kegiatannya, yang dibantu MitraPEK. Karena pada pasca proyek, kontrak kerja Fasilitator Kegiatan (FK) telah selesai, maka perannya dijalankan oleh MitraPEK, termasuk melaksanakan fungsi sebagai surveyor, disamping melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan.

Proses kegiatan pelestarian PPEK, mulai dari menampung usulan pinjaman modal bergulir, pelaksanaan survey/studi kelayakan, seleksi dan penetapan serta penentuan besarnya pinjaman, pembuatan dokumen perjanjian, pencairan dana, pendampingan terhadap mitra, pemantauan penggunaan dana dan kegiatan usaha, serta pembuatan laporan berkala dilakukan oleh MitraPEK didampingi Sekretariat TKPP di bawah pengawasan dan pengendalian TKPP Kabupaten.

Pada masa pelestarian PPEK dimana Biaya Operasional dan Pengendalian (BOP) dari proyek sudah tidak ada lagi, maka untuk BOP MitraPEK diambilkan dari sebagian pendapatan jasa pinjaman modal bergulir, sebagian lagi diakumulasikan untuk menambah dana awal pinjaman modal bergulir PPEK, sehingga dengan demikian dana pinjaman modal bergulir PPEK akan semakin besar untuk semakin memperluas jangkauan perguliran. Karena pada prinsipnya dana awal modal bergulir (modal awal) tidak boleh diambil/digunakan untuk biaya

operasional, tetapi semata-mata hanya digunakan untuk pemberian pinjaman modal bergulir.

4.2.4 Penyelesaian Masalah

Dalam upaya untuk memenuhi sasaran program serta terlaksananya prinsip-prinsip PPEK, tidak menutup kemungkinan akan dijumpai beberapa permasalahan baik pada saat pelaksanaan proyek maupun pada pasca proyek (pelestarian program) oleh karena itu diperlukan mekanisme penanganan masalah.

Timbulnya permasalahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : masalah teknis administrasi, proses pencairan, masalah non teknis yang melibatkan petunjuk pelaksanaan/surat-surat keputusan, adanya intervensi aparat pemerintahan dan intervensi politik, kurang lengkapnya informasi, serta sumberdaya manusia dan kelembagaan, penyalahgunaan dana, bencana alam dan gagalnya usaha.

Lingkup permasalahan bisa terjadi pada mitratani, pengelola program, maupun masyarakat. Untuk mengantisipasi permasalahan serta upaya penyelesaian masalah yang disebabkan oleh faktor-faktor di atas adalah :

- 1) Apabila berkaitan dengan teknis administrasi dapat ditangani langsung oleh MitraPEK;
- 2) Apabila berkaitan dengan prosedur pencairan dapat diselesaikan di MitraPEK;
- 3) Apabila berkaitan dengan Juklak/ Surat Keputusan penyelesaiannya oleh Sekretariat TKPP;
- 4) Permasalahan yang berkaitan dengan intervensi aparat pemerintah dan intervensi politik tertentu, penanganan dilakukan secara koordinatif oleh TKPP;
- 5) Penyelesaian masalah harus diberikan informasi secara jelas;
- 6) Dilakukan secara koordinatif TKPP;
- 7) Penanganan dilakukan oleh TKPP, apabila tidak dapat diselesaikan atas tindakan penyelewengan dapat digolongkan ke dalam tindak pidana, hasil penyelidikan awal dan lapangan dapat dilimpahkan kepada pihak berwajib/kepolisian;

- 8) Permasalahan adanya bencana alam, gagal usaha penyelesaian akhir oleh TKPP, untuk mencapai kesepakatan jalan keluar.
- 9) Pada prinsipnya penyelesaian masalah yang timbul dalam PPEK dilakukan melalui cara-cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, namun yang berkaitan dengan tindak penyelewengan maupun tindak pidana harus diselesaikan melalui ketentuan hukum yang ada.

4.2.5 Pengembangan Ekonomi Lokal

Dengan adanya otonomi daerah yang dilaksanakan secara efektif pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya memiliki kewenangan penuh dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan daerahnya. Demikian juga adanya Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) yang merupakan pengembangan ekonomi berbasis lokal, karena upaya yang dilakukan melalui PPEK tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya.

Kabupaten Pematang Jaya merupakan daerah agraris yang memiliki potensi sumberdaya alam, baik di bidang pertanian, peternakan, perkebunan serta perikanan untuk dikembangkan. Potensi ekonomi lokal yang bersumber dari usaha pertanian dalam arti luas tersebut perlu dikembangkan karena pelaku usaha tersebut sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan baik sebagai petani, peternak, petambak dan usaha kecil dan menengah lainnya dibidang pengolahan hasil pertanian dan memiliki keterbatasan dalam mengakses permodalan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki

Di Desa Sitemu sendiri ada satu kelompok tani ternak yang menerima dana PPEK. Kelompok tersebut memiliki anggota 30 orang peternak yang terbagi dalam enam sub kelompok dan masing-masing beranggotakan lima orang peternak itik . Masing-masing sub kelompok menerima pinjaman sebesar 20 juta rupiah dengan jaminan berupa sertifikat hak milik dan setiap sub kelompok menyerahkan satu buah sertifikat milik ketua kelompok. Adapun pembagian dana pinjaman sesuai musyawarah disepakati bersama bahwa pemilik SHM mendapat pinjaman lebih besar dari anggota kelompok dan besarnya penerimaan pinjaman untuk setiap sub kelompok bervariasi sesuai musyawarah.

Dana yang diterima dari pinjaman PPEK digunakan untuk membeli ternak baru untuk dikembangkan baik berbentuk anakan maupun itik siap telur sesuai

keinginan masing-masing peternak. Hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat peternak yang semakin meningkat dan ini bisa dilihat pada enam bulan setelah penerimaan pinjaman dimana anak itik yang dipelihara sudah berproduksi dan sebagian lainnya dijual untuk kebutuhan keluarga. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat peternak itik yang ada di Desa Sitemu dengan sendirinya usaha-usaha kecil dan menengah yang lain juga tumbuh dan berkembang seperti usaha perdagangan telur itik, usaha perdagangan pakan ternak (bekatul, nasi aking, ikan segar, ece/kerang), pengolahan telur asin, jasa pengadaan bibit itik serta usaha perdagangan alat-alat rumah tangga lainnya.

Demikian juga dengan sektor informal juga tumbuh dengan tumbuhnya ekonomi masyarakat desa seperti pedagang keliling makanan anak, pedagang kelontong keliling dan lainnya. Masyarakat lainnya yang ada di Desa Sitemu juga merasakan dampak pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh peternak itik terutama masyarakat miskin yang bekerja sebagai buruh tani ternak seperti pengembala ternak, pemberi pakan ternak yang dipelihara secara intensif di dalam kandang, dan buruh pada pedagang telur itik.

Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang ada masyarakat pedesaan dalam pengembangan agribisnis termasuk yang ada di Desa Sitemu yaitu usaha ternak itik yang merupakan usaha/bisnis lokal yang sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat secara turun-temurun. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh para petani, peternak, petambak dan pelaku agribisnis lainnya dan mendapatkan pembinaan teknis dari dinas sektoral yang terkait agar usaha yang dilakukan bisa berkembang sesuai dengan potensi komoditas yang diusahakan oleh penerima pinjaman bergulir.

Dalam hubungannya dengan hasil pemetaan sosial, Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) merupakan salah satu sumberdaya lokal yang ada di Kabupaten Pematang Jaya dalam mengatasi masalah permodalan yang dihadapi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal. Program ini menjadi modal ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah di bidang agribisnis dalam mengembangkan usahanya termasuk di dalamnya para peternak itik yang ada di Desa Sitemu. Melalui program ini potensi ekonomi lokal yang ada di Desa Sitemu yaitu usaha ternak itik bisa dikembangkan.

Adapun keterkaitan program ekonomi lokal melalui PPEK tersebut sangat berkaitan dengan permintaan pasar dari komoditas ternak itik yang sedang dikembangkan oleh masyarakat Desa Sitemu terutama adanya permintaan telur konsumsi dari Kabupaten Brebes yang sudah dikenal sebagai daerah produsen telur asin yang sudah dikenal di luar daerah. Untuk memenuhi besarnya permintaan akan produk tersebut para pengusaha telur asin tersebut juga mencari sumber-sumber penghasil telur itik ke luar daerah diantaranya ke peternak itik yang ada di Desa Sitemu. Selain kabupaten Brebes, peluang pasar dari telur itik juga masih cukup besar seperti di Jakarta, Bekasi dan Kota Cirebon.

4.2.6 Pengembangan Kapital dan Gerakan Sosial

Pengembangan modal yang ada dalam kegiatan PPEK adalah lebih kepada pengembangan modal ekonomi dengan adanya pemberian pinjaman modal usaha untuk pengembangan baik perorangan maupun kelompok usaha agribisnis yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Pengorganisasian masyarakat khususnya masyarakat peternak yang ada di desa Sitemu adalah dengan terbentuknya sub-sub kelompok yang mempunyai kesamaan usaha.

Dalam pengorganisasian peternak itik kedalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari lima orang peternak dan seluruhnya ada lima sub kelompok yang ada di Desa Sitemu didasari oleh adanya kepercayaan (*trust*) yang merupakan bagian dari modal sosial yang dimiliki oleh komunitas peternak. Kepercayaan ini diberikan kepada semua anggota kelompok karena untuk mendapatkan pinjaman yang minta sesuai proposal pengajuan pinjaman, seorang Ketua Kelompok harus memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) yang dimilikinya. Tanpa adanya kepercayaan, seorang Ketua kelompok tidak akan mau menyerahkan SHM pribadi yang dimiliki demi untuk kepentingan bersama untuk mendapatkan pinjaman dengan sistem “tanggung renteng” dimana apabila ada satu orang yang tidak bisa mengangsur yang lain ikut menanggung akibatnya yaitu terkena denda. Dengan demikian terjadi gerakan sosial antara peternak yang mampu dan memiliki agunan bisa membantu peternak yang tidak memiliki agunan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman modal dengan bergabung dalam kelompok.

Aspek psikologi sosial dari pengembangan modal dan gerakan sosial ini adalah peternak yang lemah secara ekonomi akan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemilik agunan (ketua kelompok) untuk berusaha selalu mengangsur pinjaman yang telah diterimanya setiap bulan dan berusaha dalam kondisi usaha yang sulitpun senantiasa menyisihkan keuntungan yang didapat untuk angsuran pinjaman dengan mengorbankan kepentingan pribadi.

4.2.7 Evaluasi Program PPEK

Dua dari beberapa tujuan dari Program PPEK yaitu memberdayakan masyarakat petani dan memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, hasil evaluasi terhadap Program PPEK dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan (PPEK) dalam tiga tahun pelaksanaan program belum memberdayakan peternak. Skala pemilikan ternak tidak berkembang, pemilikan ternak rata-rata kurang dari 200 ekor per peternak. Dengan demikian dan belum mencapai skala ekonomi untuk dijadikan mata pencaharian utama;
2. Kelompok usaha penerima pinjaman yang dibentuk dari empat peternak miskin dan satu peternak kaya hanya berjalan selama masa masa angsuran pinjaman (24 bulan);
3. Pada masa proyek secara umum berjalan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Tim Koordinasi Pengelola Program (TKPP) sudah berjalan sesuai tanggung jawabnya masing-masing dan menunjukkan adanya keterpaduan. Akan tetapi memasuki tahun kedua pelaksanaan proyek keterpaduan Tim yang dibentuk mulai berkurang, peran Fasilitator Kegiatan (FK) lebih dominan baik di dalam pelaksanaan survey lapangan sampai dengan penentuan kelayakan usaha. Koordinator Pelaksana Lapangan (KPL) yang merupakan tenaga teknis yang berada di lapangan kurang berfungsi;
4. Pengembalian dana pinjaman dari petani pelaku agribisnis secara umum berjalan dengan baik hal ini dapat diketahui dari penerima pinjaman bisa mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan (24 bulan). Keberhasilan melunasi pinjaman disebabkan adanya jaminan SHM.

5. Pendampingan teknis (*technical assistance*) belum dilaksanakan bagi penerima dana pinjaman PPEK meskipun di dalam pengorganisasian proyek sudah disebutkan.

4.3 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP)

Tujuan penting dari Program Pengembangan Peternakan (PPAP) melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah terwujudnya perencanaan pembangunan peternakan yang lebih berorientasi kepada *bottom-up planning*, searah dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk merubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksanaan pembangunan. Perubahan manajemen pembangunan ini menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta, serta memberdayakan masyarakat pelaku agribisnis.

Salah satu wujud nyata dari perubahan pola ini adalah pemberdayaan pelaku agribisnis yang dilaksanakan melalui fasilitasi penguatan modal yang langsung ditransfer ke rekening kelompok. Pemanfaatan dana penguatan modal kelompok ini dilakukan dalam format pinjaman bergulir dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok, peningkatan kewirausahaan dan pembinaan usaha ekonomi produktif.

Adapun indikator penting dari keberhasilan pola BLM ini adalah : 1). Terjadinya peningkatan modal usaha, 2). Peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan, 3). Peningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok, 4). Perkembangan usaha agribisnis dan agroindustri, 5). Peningkatan perguliran dana, 5). Pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan keuangan mikro dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya.

BLM merupakan sarana untuk mendorong monetisasi di pedesaan karena basis pengembangan agribisnis pada saat ini dan masa yang akan datang adalah di pedesaan. Sehingga upaya mendukung terciptanya monetisasi di pedesaan melalui pola BLM ini dapat dijadikan salah satu pemicu untuk itu. Keberhasilan pembangunan peternakan sebagian besar justru ditentukan oleh pihak terkait di luar peternakan/pertanian. Untuk itu harus selalu didorong terciptanya kondisi-kondisi dan komitmen bersama untuk mencapai keberhasilan

ini. Setiap usaha tani ternak senantiasa dikaitkan dengan investasi, perbankan/kelembagaan keuangan lain, yang bermuarakan pada kesejahteraan berbasis sumberdaya lokal untuk keberlanjutannya (*Sustainable*).

Adapun penyelenggara Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP) adalah Departemen Pertanian melalui Direktorat Jenderal Produksi Peternakan. Sumber biaya berasal dari Dana Dekonsentrasi Subsektor Peternakan Tahun Anggaran 2003 untuk Pengembangan Model Bantuan Ekonomi Produktif dengan pola BLM dengan pendekatan-pendekatan baru sebagai percontohan khusus (hanya di beberapa daerah). Kegiatan tersebut merupakan upaya penyempurnaan terhadap pola BLM yang sudah ada.

Beberapa model pendekatan baru yang dimaksudkan diantaranya adalah : 1) skala ekonomi usaha peternakan, 2) berwawasan lingkungan, 3) kerjasama dengan kelembagaan keuangan, 4) kerjasama dengan kelembagaan keagamaan masyarakat (Islam/Pondok Pesantren, Katholik, Protestan dan Hindu), 5) membangkitkan perekonomian daerah konflik, 6) introduksi teknologi transfer embrio dan 7) kerjasama dengan kelembagaan perguruan tinggi.

Model-model pendekatan dalam pola bantuan langsung masyarakat program pemberdayaan agribisnis peternakan (PPAP) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Skala ekonomi usaha peternakan, dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan usaha peternakan oleh masing-masing kelompok/individu memenuhi perhitungan skala ekonomi untuk setiap komoditi ternak dengan kondisi setempat, apabila diperlukan dapat menggunakan jasa ahli/pakar sebagai pendamping.
2. Berwawasan lingkungan, model pendekatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan usaha peternakan yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan, sehingga perkembangannya ke depan dapat lebih baik, memenuhi prasyarat kesehatan dan pelestarian lingkungan.
3. Kerjasama dengan Kelembagaan Keuangan, seperti diketahui bahwa salah satu keterbatasan dari kelompok peternak yang melaksanakan pola BLM umumnya dalam hal pengelolaan keuangan dan pergulirannya, sehingga melalui model pendekatan ini akan dicoba suatu kerjasama antara kelompok peternak dengan kelembagaan keuangan setempat untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

4. Kerjasama dengan Kelembagaan Keagamaan, dimaksudkan bahwa dalam perkembangan dana masyarakat pola BLM dapat diketahui bahwa peranan tokoh-tokoh agama sangat berpengaruh, terutama untuk menjaga semangat kebersamaan kelompoknya sehingga pada gilirannya dapat mendukung keberlanjutan usaha melalui pergulirannya.
5. Fasilitasi daerah konflik, dimaksudkan bahwa di beberapa daerah diketahui telah terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan perekonomian wilayah terganggu, sehingga perlu adanya fasilitasi untuk mendorong berkembangnya perekonomian diantaranya melalui usaha peternakan rakyat pola BLM untuk masing-masing kelompok yang bertikai sekaligus diharapkan dapat meredakan konflik.
6. Kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi, dimaksudkan untuk pemanfaatan Perguruan Tinggi setempat agar dapat memberikan transfer ilmu pengetahuan yang berguna bagi kelompok peternak di sekitarnya.

Melalui Proyek Pengembangan Agribisnis Peternakan, anggota kelompok tani ternak penerima kegiatan PPAP setelah menerima paket dana penguatan modal usaha ternak itik diharapkan ternak yang dipelihara meningkat jumlahnya dan mencapai skala ekonomi usaha ternak itik. Dengan peningkatan jumlah kepemilikan ternak itik tersebut tentunya usaha yang semula hanya sambilan nantinya berkembang menjadi usaha pokok keluarga peternak. Dengan demikian tentunya pendapatan dari usaha ternaknya bisa meningkat dan pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut bisa di atas upah minimum kabupaten (UMK).

Setelah menerima dana pinjaman bergulir dari PPAP para anggota kelompok penerima bantuan langsung masyarakat (BLM) mulai menambah jumlah ternak yang dimiliki baik dengan pembelian anak itik maupun itik yang sudah siap telur. Jumlah dana bantuan yang diterima untuk setiap peternak sebesar 4 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bibit ternak itik, pengadaan pakan dan pembelian obat-obatan/vitamin untuk pemeliharaan ternak. Sehingga dalam jangka waktu antara satu sampai enam bulan peternak mulai menikmati hasil dari ternaknya baik berupa telur maupun ternak itik betina hasil pembesaran yang siap untuk dijual dengan harga Rp25 000.00 per ekor.

Dengan adanya proyek PPAP perekonomian masyarakat desa tumbuh dengan berkembangnya usaha masyarakat peternak itik yang ada karena usaha kecil yang berkaitan dengan ternak itik juga berkembang seperti industri kecil

pengolahan telur asin, usaha perdagangan telur, pakan ternak dan bibit ternak. Dan masyarakat baik yang ada di Desa Sitemu maupun masyarakat sekitarnya bisa merasakan kemakmuran yang terjadi di sana dengan berkembangnya usaha ternak itik yang ada.

Proyek PPAP di Desa Sitemu telah memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang ada baik berupa lahan pertanian tanaman pangan yang ada seluas 131,244 Ha yang merupakan daya dukung untuk usaha ternak itik karena menghasilkan limbah pertanian seperti bekatul yang selalu tersedia setiap saat dengan harga yang relatif murah sebagai pakan ternak serta lahan sebagai tempat pengembalaan ternak itik ketika musim panen. Sedangkan sumberdaya lokal yang lain adalah tenaga kerja yang ada di Desa Sitemu di mana jumlah penduduk usia kerja (15-64) tahun dimana sebagian besar dari penduduk tersebut memiliki keterampilan beternak itik yang sudah diwariskan oleh orang tuanya secara turun-temurun.

Dengan adanya kegiatan PPAP ini, kelompok-kelompok usaha yang berhubungan dengan komoditas ternak itik semakin berkembang dan sudah ada kerjasama perdagangan telur dengan pengusaha pengolahan telur asin yang ada di Kabupaten Brebes dan Perusda Pertanian. Selain itu pemasaran telur juga sudah menjalin kerjasama pemasaran (*networking*) dengan pedagang besar yang ada di kota-kota seperti Jakarta, Cirebon dan Bekasi.

Kegiatan PPAP ini bisa berjalan dengan baik pada tujuh bulan pertama pelaksanaan proyek dimana jumlah peternak yang terlibat pada awal pelaksanaan kegiatan sebanyak 20 orang peternak sudah berkembang menjadi 27 peternak dari penerima dana perguliran.

Perkembangan terakhir pada bulan Oktober 2005 dengan adanya kenaikan harga pakan ternak seperti ikan segar dan nasi aking para peternak banyak yang tidak bertahan usahanya karena tidak seimbang antara biaya produksi dengan hasil yang diperoleh. Dampak dari kondisi tersebut angsuran dana perguliran macet dan sebagian peternak yang ada beralih profesinya baik sebagai buruh, bengkel sepeda dan usaha lainnya untuk menyambung kehidupannya. Pada akhirnya kegiatan yang ada di Kelompok Tani Ternak Sri Rejeki juga berhenti.

Pengembangan modal yang terjadi pada empat bulan pertama setelah adanya proyek PPAP adalah berkembangnya modal yang dimiliki oleh kelompok tani ternak Sri Rejeki dalam usaha bersama untuk pembelian telur itik dari para

anggota kelompok. Modal awal untuk usaha ini berasal dari kas kelompok dan penyisihan dari dana perguliran yang dikumpulkan melalui pengurus kelompok.

Dalam kegiatan PPAP ini masyarakat peternak itik khususnya diorganisir melalui kelompok tani ternak yang ada dengan berbagai kegiatan kelompok yang dilaksanakan setiap bulannya. Pengorganisasian yang ada meliputi kegiatan-kegiatan seperti: dana perguliran dikumpulkan oleh pengurus kelompok, penyerahan dana perguliran kepada peternak penerima dana perguliran dilaksanakan pada pertemuan anggota kelompok yang dilaksanakan setiap bulan dengan disaksikan oleh Tim Teknis dari Dinas Pertanian selaku penanggungjawab kegiatan dan Kepala Desa Sitemu.

Adapun yang menentukan peternak penerima dana perguliran adalah dari anggota kelompok itu sendiri melalui musyawarah sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh kelompok seperti peternak yang kesulitan mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usaha, jujur dan mau menjadi anggota kelompok tani ternak serta bersedia mengembalikan dana yang diterima kepada Pengurus Kelompok Tani Ternak Sri Rejeki sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Adapun aspek psikologi sosial dari pengembangan modal dan gerakan sosial ini adalah penerima paket pertama PPAP akan berusaha mengembalikan pinjaman yang diterima dengan mengangsur setiap bulan, karena setiap bulan harus ada dana yang digulirkan kepada peternak baru. Penyerahan dana tersebut dilaksanakan pada pertemuan kelompok yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok dan Dinas Pertanian serta Kepala Desa. Dengan demikian penerima dana perguliran akan menyesuaikan terhadap aturan-aturan yang ada di kelompok setelah dirinya menjadi anggota kelompok. Penyesuaian (*adaptation*) tersebut adalah perilaku yang ada akan menyesuaikan perilaku peternak-peternak lain yang sudah terlebih dulu bergabung dalam kelompok yang berkaitan dengan kegiatan usaha ternak itik maupun perilaku dalam hal pengembalian dana perguliran.

Perkembangan terakhir pelaksanaan proyek, kondisi sebagian peternak menghadapi kesulitan karena usahanya tidak menguntungkan akibat kenaikan harga pakan. Kondisi ini menyebabkan sebagian peternak tidak bisa mengangsur pinjaman dan diikuti peternak-peternak yang lain. Pada akhirnya pengurus kelompok kesulitan untuk menarik angsuran perguliran, sehingga dana perguliran tidak bisa terkumpul sesuai dengan ketentuan (macet).

Adapun konflik yang ada di dalam masyarakat adalah konflik yang terjadi pada sub-sub kelompok peternak penerima dana PPEK. Terjadinya konflik disebabkan pembagian dana pinjaman yang tidak sama antara anggota dengan ketua sub kelompok yang terdiri dari lima orang peternak.

Sesuai dengan penahapan, konflik yang terjadi termasuk ke dalam tahapan prakonflik karena ketidaksesuaian keinginan antara anggota kelompok yang menginginkan dana pinjaman yang diterima sebesar 20 juta rupiah per kelompok dibagi rata. Dengan demikian setiap peternak menerima 4 juta rupiah. Di lain pihak ketua sub kelompok menginginkan menerima pinjaman lebih besar dengan alasan jaminan yang digunakan untuk persyaratan adalah milik pribadi ketua sub kelompok. Adanya ketidaksesuaian tersebut akhirnya menimbulkan konflik dan ada ketegangan antara anggota kelompok dengan ketua sub kelompok.

Dengan bantuan Kepala Desa Sitemu yang berperan sebagai mediator melalui musyawarah akhirnya disepakati bahwa anggota kelompok menerima dana pinjaman sebesar 3,8 juta rupiah dan ketua sub kelompok menerima pinjaman sebesar 4,8 juta rupiah karena mempunyai resiko apabila kelompok tidak bisa melunasi pinjaman sertifikatnya akan ditahan oleh pemberi pinjaman (MitraPEK) sesuai ketentuan yang ada.

4.4 Ikhtisar

Pemberdayaan terhadap komunitas di Desa Sitemu sudah dilakukan sejak tahun 1993 melalui program Inpres Desa (IDT) melalui berbagai bantuan baik yang bersifat fisik (sarana prasarana) maupun yang bersifat non fisik (ekonomi produktif) seperti bantuan ternak, permodalan untuk simpan pinjam sampai dengan pelatihan keterampilan. Bantuan yang diberikan melalui pendekatan kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk oleh masyarakat melalui intervensi pemerintah.

Demikian juga pemberdayaan terhadap komunitas petani/peternak itik yang ada di Desa Sitemu sejak tahun 1993 sampai dengan 2005 masih menggunakan pendekatan kelompok tani sebagai penerima perogram pengembangan ekonomi petani/peternak. Pendekatan pemberian bantuan melalui kelompok dengan pertimbangan memudahkan di dalam pembinaan dan pengawasan. Akibatnya di masyarakat banyak terbentuk kelompok-kelompok baru dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) dan Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP) merupakan dua program pemberdayaan petani/peternak yang menggunakan pendekatan kelompok. Program PPEK lebih menekankan bantuan penguatan modal petani/peternak yang terhimpun dalam kelompok maupun perorangan, sedangkan pada program PPAP lebih ditekankan pada penguatan modal kelompok tani ditambah pelatihan keterampilan beternak terhadap anggota kelompok penerima paket penguatan modal.

Dari hal tersebut di atas bisa dilihat bahwa kapasitas kelembagaan kelompok tani penerima bantuan merupakan hal yang menentukan di dalam melaksanakan suatu program. Kapasitas kelembagaan lain yang ada di komunitas Sitemu juga ikut mendukung keberhasilan program yang ada di Desa Sitemu. Dengan demikian kapasitas kelembagaan harus dikuatkan terlebih dahulu ataupun bersama penguatan modal. Dengan berkembangnya kapasitas kelembagaan akan terjadi transformasi sosial diantara anggota kelompok yang pada akhirnya melahirkan gerakan sosial di dalam masyarakat untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan yang terjadi di komunitas Sitemu.

Kegagalan dari program pengembangan masyarakat yang ada diakibatkan modal sosial belum terbentuk di dalam kelompok. Belum ditekankan pentingnya kapital sosial di dalam mendukung berhasilnya sebuah program pengembangan masyarakat.

Hasil evaluasi terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) diketahui bahwa: (1) Pelaksanaan PPEK dalam kurun waktu tiga tahun pelaksanaan program belum bisa memberdayakan peternak, skala kepemilikan ternak itik kurang dari 200 ekor per peternak atau dengan kata lain belum mencapai skala ekonomi untuk dijadikan mata pencaharian utama peternak, (2) kelompok usaha penerima pinjaman yang dibentuk dari empat peternak miskin dan satu peternak kaya hanya berjalan selama masa angsuran pinjaman (24 bulan), (3) Pada masa pelaksanaan proyek secara umum program berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Tim Koordinasi Pengelola Program (TKPP) sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dan adanya keterpaduan. Akan tetapi pada tahun kedua pelaksanaan proyek keterpaduan Tim yang dibentuk mulai berkurang, (4) Pengembalian dana pinjaman dari peternak tepat waktu karena adanya agunan berupa sertifikat hak milik (SHM).

V. KEMISKINAN

5.1 Kemiskinan di Desa Sitemu

Berdasarkan hasil pendataan sosial ekonomi penduduk (PSEP) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2005 diketahui jumlah keluarga miskin di Desa Sitemu 340 KK. Kriteria untuk menetapkan kemiskinan yang digunakan adalah menggunakan sembilan kriteria kemiskinan antara lain: bangunan rumah tidak permanen, dinding terbuat dari papan, lantai menggunakan tanah, tidak memiliki WC, sumber air berasal dari sumur yang tidak terlindung, penerangan menggunakan lampu minyak, membeli pakaian untuk anggota keluarga tidak mesti setahun sekali, memasak menggunakan kayu bakar, makan tidak lebih dari dua kali, tidak memiliki perhiasan emas/sepeda motor/ ternak, penghasilan kurang dari 300 ribu per bulan, pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat/hanya tamat SD. Hasil pendataan tersebut pada akhirnya menimbulkan kontroversi karena hanya dikaitkan dengan jumlah KK yang menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan kenyataan yang ada masih banyak keluarga miskin yang tidak mendapatkan dana tersebut karena tidak masuk dalam KK miskin yang ditetapkan dengan Kartu Keluarga Miskin (KKM).

Indikator kemiskinan yang ada pada komunitas di Desa Sitemu dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan anggota masyarakat bisa diketahui: *Pertama*, masih banyak anak usia sekolah yang bekerja di kota-kota besar untuk membantu ekonomi keluarga; *Kedua*, tingkat kesehatan anak-anak usia di bawah lima tahun yang rendah; *Ketiga*, masih banyak rumah yang tidak layak baik dari aspek kesehatan maupun perlindungan.

Sementara dengan melihat komposisi penduduk Desa Sitemu berdasarkan mata pencaharian, diketahui bahwa mata pencaharian terbesar penduduk bekerja sebagai buruh 621 KK (63,83%) yang bekerja sebagai buruh tani (tanaman pangan), buruh di usaha peternakan itik, buruh industri rumah tangga serta buruh bangunan. Penghasilan dari buruh-buruh tersebut antara 15-20 ribu per hari dengan rata-rata jam kerja 10 jam/hari. Buruh pada usaha tanaman pangan adalah buruh musiman pada saat musim tanam sampai tanaman berumur dua bulan, setelah itu tidak bekerja. Sedangkan buruh pada usaha peternakan itik adalah seperti pengembala ternak itik, buruh harian tetap pada usaha ternak itik secara intensif dengan tugas memberi pakan ternak, mengambil telur, membersihkan peralatan kandang, menyeleksi ternak itik yang sudah tidak

produktif untuk diafkir dan bekerja tidak tergantung musim. Dari data di atas tentunya lebih menjelaskan jumlah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) .

Gejala kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Desa Sitemu berdasarkan hasil observasi di lapangan berkaitan dengan ketiadaan akses kebutuhan hidup seperti: kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi. Lingkungan pemukiman perumahan yang padat, saluran air yang tidak terpelihara dan kebersihan di lingkungan kandang ternak itik yang kurang terjaga menyebabkan kualitas kesehatan keluarga peternak rendah. Ketika wawancara mendalam terhadap peternak dijumpai adanya anggota keluarga yang sakit. Dalam satu rumah ada dua orang yang sakit. Penyakit yang ada diantaranya penyakit kulit pada anak-anak, pernapasan dan penyakit lain.

Selain penyakit, gejala kemiskinan yang lain adalah ketiadaan akses air bersih, karena rata-rata sumber mata air yang berasal dari sumur gali, mudah tercemar limbah dari peternakan itik ketika terjadi hujan. Hal ini bisa dilihat dari kualitas air yang berubah warna dan berbau. Sementara sumber air dari sumur artesis yang pernah dibangun melalui bantuan dari pemerintah provinsi dalam kondisi tidak terawat dan sebagian rusak.

Ciri lain kemiskinan yang terjadi di masyarakat Desa Sitemu adalah ketiadaan jaminan masa depan yang diakibatkan tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Dari hasil wawancara dari peternak itik yang diduga miskin, diketahui sebagian besar anak-anak usia sekolah yang ada harus bekerja di Jakarta untuk membantu orang tua. Dengan keterbatasan yang ada mereka hanya menyekolahkan anak-anaknya sampai sekolah dasar. Investasi untuk keluarga juga tidak ada, karena penghasilan yang diperoleh hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Ini terjadi pada sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai buruh. Investasi yang masuk ke Desa Sitemu untuk usaha ekonomi lokal (ternak itik) sekarang ini menurun, dibandingkan pada tahun sembilan puluhan.

Dengan berkurangnya investasi dalam usaha ternak itik, mengakibatkan berkurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian sebagai peternak juga berkurang. Adanya investasi tersebut akan menambah lapangan kerja di bidang peternakan, pekerjaan di peternak dengan kepemilikan besar. Sebagai gambaran pemeliharaan ternak dengan sistem intensif (dikandangan terus menerus) dengan jumlah 2000 ekor membutuhkan dua

orang tenaga kerja dengan gaji per bulan antara 300 sampai 400 ribu rupiah per orang.

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Desa Sitemu, berkaitan dengan tidak berkembangnya usaha ekonomi lokal yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Sitemu yaitu usaha ternak itik petelur dan pembesaran itik dalam lima tahun terakhir. Hal ini bisa diketahui dari informasi yang disampaikan oleh para peternak ketika diskusi kelompok di Sekretariat Kelompok Tani Ternak Itik Sri Rejeki diperoleh gambaran bahwa usaha ternak itik sebelum tahun 2003 adalah sangat menguntungkan, investasi modal dari luar desa banyak yang masuk melalui kelembagaan tradisional *mertelu* dalam usaha pembesaran ternak itik untuk dijadikan bibit itik petelur.

5.2 Kemiskinan di Komunitas Peternak Itik

Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam terhadap peternak dengan kepemilikan ternak di bawah 200 ekor dan beternak itik sebagai satu-satunya usaha, ditemukan adanya gejala kemiskinan. Indikator terjadinya kemiskinan yang dialami oleh para peternak tersebut antara lain: kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan karena kandang ternak menyatu dengan tempat tinggal, kualitas kesehatan anggota rumah tangga yang rendah dan ada sebagian yang sakit, anak-anak usia sekolah harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, transportasi yang digunakan untuk keperluan usaha dan keluarga menggunakan sepeda, rata-rata peternak terikat pinjaman uang kepada juragan telur, lembaga keuangan yang ada di desa seperti Badan Kredit Desa (BKD), BPR BKK dan BRI Unit Desa.

Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok yang dilakukan dengan pengurus kelompok dengan anggota kelompok tani Sri Rejeki yang masih tersisa diperoleh informasi bahwa kondisi peternak tidak bisa bangkit dari kesulitan yang dihadapi di dalam usaha ternaknya dan pada akhirnya usaha ternaknya berhenti. Hal ini sebagai akibat para peternak tidak punya keberanian untuk lepas dari juragan. Ketidakberanian tersebut disebabkan peternak sudah terikat dengan pinjaman uang. Juragan tersebut adalah pedagang pengumpul telur itik yang diberi modal oleh pedagang besar dari luar desa.

5.2.1 Pendapatan

Pendapatan peternak itik dihitung dari selisih antara penjualan telur itik yang dihasilkan dengan kesesuaian biaya produksi yang dikeluarkan atau hasil pengurangan dari total output dengan total input. Biaya produksi yang terbesar adalah untuk biaya pakan ternak yang bisa mencapai 70 sampai 80 persen dan sisanya untuk biaya obat-obatan, vitamin. Penerimaan diperoleh dari penjualan telur, penjualan itik afkir dan penjualan kotoran ternak. Pendapatan peternak sangat dipengaruhi oleh hasil produksi, harga telur dan harga pakan bahan pakan (bekatul, ikan segar, nasi aking dan ece). Pada peternak miskin di Desa Sitemu, pemasaran telur sudah dikuasai oleh tengkulak/juragan telur karena keterikatan pinjaman uang.

Pendapatan rata-rata peternak itik dengan pemilikan ternak 200 ekor adalah antara 15-20 ribu rupiah per hari dalam kondisi harga bahan pakan ternak tidak fluktuatif dengan tingkat produksi 50 persen. Dalam kondisi musim penghujan dan ikan segar sulit di dapat dan walaupun ada harganya tidak terjangkau oleh peternak kecil, maka produksi ternak menurun drastis. Kondisi demikian menyebabkan banyak peternak rugi yang pada akhirnya menghentikan usahanya dan bekerja sebagai buruh.

5.2.2 Aset

Aset yang dimiliki peternak kecil, terbatas bahkan tidak memiliki sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki sebagai peternak miskin, seperti rumah dimana ia tinggal, perabotan rumah tangga, pekarangan dan sarana transportasi. Kepemilikan asset bisa mempengaruhi modal sebagai contoh aset yang dimiliki bisa diagunkan atau digadaikan untuk mendapatkan modal.

Kemiskinan yang ada pada peternak itik di Desa Sitemu bisa diketahui dari hasil wawancara mendalam terhadap peternak dengan kepemilikan ternak kurang dari 200 ekor. Dari 31 peternak yang ada di Desa Sitemu ada sebanyak 12 peternak yang dengan jumlah ternak itik antara 70 sampai 200 ekor, sedangkan 19 peternak lainnya jumlah kepemilikan antara 300 sampai dengan 2500 ekor. Adapun kemiskinan yang terjadi pada komunitas peternak itik di Desa Sitemu bisa diketahui dari jumlah kepemilikan yang relatif kecil (kurang dari 200 ekor) per rumah tangga peternak dengan demikian skala usaha tidak efisien, rendahnya kemampuan peternak untuk meningkatkan jumlah kepemilikan ternak hal ini disebabkan karena rendahnya akumulasi modal akibat produktivitas usaha

tani ternak rendah, serta rendahnya kemampuan dalam mengelola aset (sehingga alokasi aset tidak efektif dan tidak efisien) sebagai contoh penggunaan teknologi rendah. Peternak itik di Desa Sitemu belum mengetahui teknologi untuk pengawetan ikan segar, penetasan telur itik dan penggunaan tepung ikan untuk pengganti ikan segar ketika musim ombak besar dan ikan laut sulit didapat.

5.2.3 Produktivitas

Produktivitas peternak itik dengan kepemilikan ternak kurang dari 200 ekor sangat rendah karena curahan waktu yang digunakan untuk kegiatan usaha rata-rata enam jam sehari. Curahan waktu yang dipergunakan setiap hari bisa dirinci sebagai berikut: mengambil telur, membersihkan kandang/tempat makan dan minum, memberi makan (60 ttt), mencari ikan laut ke tempat pelelangan ikan (120 ttt), mencacah ikan dan memberikan kepada itik (60 ttt), mempersiapkan pemberian pakan kedua pada sore hari (60 ttt). Sementara pendapatan kotor peternak dengan pemilikan itik sebanyak 200 ekor dalam kondisi harga pakan stabil berkisar 15-20 ribu rupiah per hari dengan jumlah anggota rumah tangga antara empat sampai tujuh orang dan usaha ternak merupakan sumber pendapatan utama keluarga.

Kemampuan satu orang dalam pemeliharaan ternak secara intensif dengan dikandangkan secara terus-menerus bisa mencapai jumlah 500 ekor. Dengan memelihara ternak dengan jumlah 500 ekor, curahan waktu dan tenaga yang digunakan akan sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Selain itu berpengaruh terhadap biaya untuk pembelian pakan. Semakin banyak jumlah bahan pakan yang dibeli akan semakin murah harga yang di dapat. Dengan demikian akan lebih efektif dan efisien di dalam berusaha ternak.

5.2.4 Modal

Modal yang berasal dari PPEK tidak bisa berkembang meskipun peternak miskin bisa mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan dan modal pinjaman yang berasal dari Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pematang Jaya tidak berkembang. Hal ini bisa diketahui dari pemilikan ternak dari masing-masing penerima pinjaman setelah pinjaman berakhir ternak yang dimiliki tidak bertambah jumlahnya bahkan sebagian peternak jumlah kepemilikannya berkurang.

Demikian juga modal yang diperoleh dari BKD, dan Unit Pelayanan BPR BKK juga tidak berkembang karena angsuran macet. Adapun modal yang baru diperoleh dari “juragan” telur dengan imbalan hasil telur diambil oleh juragan sebagai angsuran. Perilaku yang ada pada peternak miskin di Desa Sitemu dalam mendapatkan modal pinjaman dari tengkulak/juragan adalah dengan meminjam kepada lebih dari satu orang. Dengan tujuan ada kontrol terhadap harga telur diantara tengkulak-tengkulak yang ada kaitan dengan telur itik yang akan diambil sebagai setoran.

5.2.5 Skill

Skill atau keahlian yang dimiliki oleh peternak miskin diperoleh pengalaman ketika membantu orang tuanya, ketika bekerja sebagai buruh di peternakan itik dan selama menjadi anggota kelompok dan hasil penyuluhan dan pelatihan sebelum mendapatkan bantuan modal dari program penguatan modal untuk peternak itik serta penelitian yang pernah dilakukan oleh lembaga penelitian dari Departemen Pertanian dan perguruan tinggi.

Keahlian yang dimiliki diantaranya: keahlian memelihara ternak itik umur satu sampai lima bulan untuk dijadikan bibit, kemampuan menyeleksi ternak itik yang tidak produktif untuk dilakukan pengafkiran serta kombinasi sistem pemeliharaan secara intensif dan tradisional ketika harga bahan pakan tinggi dan musim panen ternak digembalakan di sawah untuk mengurangi biaya pakan.

Dari hasil wawancara mendalam terhadap responden dengan kepemilikan ternak kurang dari 200 ekor rata-rata punya pengalaman beternak lebih dari 10 tahun, pendidikan peternak rata-rata hanya tamat sekolah dasar (SD) pada peternak yang berusia muda dan tidak tamat SD dari peternak yang berusia tua. Usaha ternak itik di Desa Sitemu merupakan satu-satunya usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sebagian besar masyarakat hanya memiliki ketrampilan beternak itik yang sudah diwariskan oleh orang tua mereka.

5.3 Ikhtisar

Indikator kemiskinan pada komunitas Sitemu bisa diketahui dari: *Pertama*, tingginya jumlah kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh (63,83%) dengan upah 15-20 ribu per hari; *Kedua*, masih banyak anak usia sekolah yang harus bekerja ke kota-kota besar untuk membantu ekonomi keluarga; *Ketiga*, tingkat

kesehatan anak-anak usia di bawah lima tahun yang rendah; *Keempat*, masih banyak rumah yang tidak layak baik dari aspek kesehatan maupun perlindungan.

Adapun kemiskinan di Desa Sitemu disebabkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari usaha pertanian mengalami penurunan. Usaha ekonomi lokal masyarakat melalui ternak itik yang sudah berjalan sejak lama banyak menemui kendala. Kendala tersebut baik yang disebabkan oleh faktor alam seperti musim penghujan/angin, penyakit flu burung pada ternak yang belum bisa diatasi, menurunnya kelembagaan *mertelu* dan kebijakan pemerintah yang belum serius di dalam memberdayakan petani/peternak miskin.

Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya investasi dalam usaha ternak itik di komunitas Sitemu. Dengan berkurangnya investasi tersebut berdampak pada berkurangnya lapangan kerja di bidang peternakan itik seperti pekerja harian pemelihara ternak, pengembala ternak itik umur 1-3 bulan di sawah pada musim panen, pekerja bongkar muat di pedagang pengumpul telur.

Kemiskinan pada peternak itik di Desa Sitemu disebabkan oleh pendapatan peternak yang rendah (15-20 ribu rupiah) per hari sedangkan jumlah anggota rumah tangga antara 4-5 orang per KK, aset berupa aspek pasar dimana produksi hasil ternak berupa telur itik telah dikuasai oleh para tengkulak. Selisih harga pembelian telur yang cukup tinggi sangat merugikan peternak itik, namun demikian peternak tidak bisa berbuat banyak karena mereka sudah terikat pinjaman uang dari para tengkulak.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dihadiri oleh pengurus, anggota kelompok tani dan unsur dari Dinas Pertanian dan Peternakan diperoleh informasi bahwa kondisi peternak tidak bisa bangkit dari kesulitan dan kemiskinan akibat ketidakberanian untuk lepas dari juragan/tengkulak. Juragan adalah pedagang pengumpul telur itik yang diberi modal oleh pedagang besar dari luar desa Sitemu. Ketidakberanian melepaskan ikatan juragan disebabkan peternak itik sudah terikat oleh pinjaman uang dari para juragan/tengkulak yang ada.

Dengan demikian kemiskinan yang terjadi pada komunitas peternak itik di Desa Sitemu berkaitan dengan pendapatan peternak yang masih rendah (15-20 ribu rupiah) per hari, aset berupa ternak yang dimiliki oleh peternak yang relatif kecil (kurang dari 200 ekor) sehingga tidak efisien sebagai usaha pokok rumah tangga peternak, produktivitas peternak yang rendah serta kecilnya permodalan yang dimiliki oleh peternak .

VI. PEMBERDAYAAN PETERNAK MISKIN DAN PenguATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI

6.1. Pemberdayaan Peternak Miskin

Program pemberdayaan peternak itik mulai dilaksanakan pada peternak itik sejak kelompok tani berdiri tahun 1992. Program bantuan untuk pengembangan peternak itik yang bersifat *top-down* pernah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai nama program/proyek. Program/proyek tersebut baik berasal dari pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten.

Salah satu program pengembangan peternak itik di era otonomi daerah yang diterima oleh kelompok tani yang ada di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2004-2007) adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK). Sumber dana PPEK berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pemalang dengan anggaran sebesar 1,880 milyar. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang dengan kerjasama Dinas-dinas lingkup Pertanian dan Bagian pada Sekretariat Daerah Pemalang. Dari anggaran tersebut kelompok tani ternak yang ada di Desa Sitemu menerima dana pinjaman sebesar 130 juta rupiah untuk 31 peternak yang terbagi atas enam kelompok dan masing masing kelompok beranggotakan lima peternak ditambah satu orang peternak perorangan.

Selain program tersebut di atas, masih ada satu program yang khusus untuk memberdayakan peternak yang berasal dari dana dekonsentrasi Departemen Pertanian yang dialokasikan untuk penguatan kelompok-kelompok usaha agribisnis yaitu Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP). Program ini dilaksanakan pada tahun 2004 dengan dana untuk penguatan modal kelompok sebesar 100 juta rupiah per kelompok. Kelompok tani Sri Rejeki Desa Sitemu adalah penerima program ini di Kabupaten Pemalang. Dana penguatan modal kelompok yang diterima sebesar 100 juta rupiah untuk 20 orang anggota kelompok.

Dari kedua program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat bertujuan untuk memberikan masyarakat sumberdaya modal untuk pengembangan usaha ternak itik dan juga memberikan

keterampilan di dalam beternak. Keterampilan juga diberikan calon penerima bantuan terlebih dahulu melalui bimbingan dan keterampilan di dalam mengelola usaha ternaknya, pengetahuan tentang penyakit yang bisa menyerang unggas oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan pendapatan, kemandirian (material, intelektual, manajemen) serta meningkatnya partisipasi peternak baik di dalam kelompok tani maupun di masyarakat.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk memberdayakan peternak miskin di Desa Sitemu, perlulah kiranya untuk mengetahui kapasitas yang dimiliki oleh peternak itik yang tergolong miskin. Kapasitas peternak miskin perlu diketahui karena merupakan titik masuk sebelum memberdayakan peternak itik yang tergolong miskin tersebut. Kapasitas peternak itik yang tergolong miskin bisa dilihat dari Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Matriks Kapasitas Peternak Miskin di Desa Sitemu

NO	Identitas Responden			Pendidikan	Keterampilan	Sumber Pendapatan	
	Nama	Umur	Jml Art			Utama	Tambahan
1	Taridi	41	5	SD	Beternak Itik	V	-
2	Tarjuki	42	4	SD	Beternak Itik	V	-
3	Karyan	58	6	SD	Beternak Itik	V	-
4	Rusnadi	62	5	SD	Beternak itik	V	-
5	Sarinten	56	4	SD	Beternak itik	V	-
6	Wastro	60	7	SD	Beternak itik	V	-
7	Karji	53	4	SD	Beternak itik	V	-
8	Solikhin	51	6	SD	Beternak itik	V	-
9	Wismo	57	5	SD	Beternak itik	V	-
10	Takmad	58	4	SD	Beternak itik	V	-
11	Kasbuni	50	5	SD	Beternak itik	V	-
12	Tarjo	39	4	SMP	Beternak itik	V	-

Sumber: Data hasil wawancara dengan responden

Dari data tersebut di atas bisa diketahui kapasitas yang ada pada peternak itik yang tergolong miskin diantaranya: usia peternak yang sebagian besar sudah lanjut, jumlah anggota rumah tangga cukup besar, pendidikan tertinggi hanya SMP dan usaha ternak itik merupakan sumber penghasilan utama.

6.2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Sri Rejeki

6.2.1 Kepengurusan

Kepengurusan yang ada pada waktu kajian ini dilakukan terhadap kelompok tani ternak itik Sri Rejeki adalah hasil musyawarah kelompok tani pada tahun 2003. Adapun struktur kelembagaan kelompok tani terdiri pengurus dan seksi-seksi. Susunan kepengurusan selengkapnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Produksi, Seksi Kesehatan Hewan dan Seksi Penyuluhan. Nama-nama seksi tersebut diadopsi dari seksi-seksi yang ada pada Sub Dinas Peternakan pada waktu itu.

Tugas dari pengurus adalah mengelola usaha bersama pembelian telur itik dari anggota kelompok, merencanakan pertemuan kelompok, menerima tamu dari kelompok tani lain/dinas instansi/perguruan tinggi. Kepengurusan kelompok tani ternak itik sekarang ini dalam kondisi yang tidak aktif. Ketidaktifan tersebut diakibatkan antara lain sebagian pengurus sudah tidak memelihara ternak itik karena mengalami kebangkrutan, satu orang pengurus meninggal dunia.

6.2.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam kelompok tani ternak itik Sri Rejeki selama lima tahun terakhir bisa dikatakan tidak berjalan, karena usaha bersama, perguliran dan pertemuan kelompok macet. Pimpinan kelompok yang ada tinggal ketua kelompok. Ketua kelompok dijabat oleh seorang tokoh masyarakat dan juga tokoh peternak seorang perempuan dengan berbagai jabatan dalam organisasi yang ada di Desa Sitemu seperti Ketua BPD Desa Sitemu, Pengurus LPMD serta Wakil Ketua Forum Komunikasi BPD Kecamatan Taman. Sehingga kepemimpinan di dalam kelompok tani ternak bisa dikatakan berhasil. Hal ini terbukti dari keberhasilannya membawa kelompok tani menjadi kelompok agribisnis berprestasi tingkat nasional pada tahun 2003.

Akan tetapi dari sisi pengembangan partisipasi keanggotaan di dalam kelompok masih sangat kurang. Karena di dalam pengambilan keputusan di dalam kelompok peran ketua sangat dominan. Dari hasil penelitian karakteristik petani/peternak yang pernah dilakukan oleh perguruan tinggi pada tahun 2005 di Kelompok Tani Sri Rejeki menunjukkan bahwa peran ketua kelompok sangat dominan dalam kegiatan yang dipimpinnya.

6.2.3 Norma Aturan

Norma-norma yang disepakati di dalam kelompok adalah norma-norma sebagaimana yang ada dan berlaku di masyarakat Desa Sitemu pada umumnya. Adapun aturan yang disepakati bersama oleh anggota kelompok adalah dalam hal angsuran dana perguliran yang harus disetorkan kepada pengurus setiap bulan untuk selanjutnya diserahkan kepada peternak penerima perguliran dalam pertemuan bulanan kelompok. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompok. Ketentuan-ketentuan yang ada pada AD/ART hanya sebagian kecil saja yang bisa dilaksanakan oleh anggota maupun pengurus kelompok tani.

6.2.4 Jaringan Mitra Kerja

Jaringan mitra kerja yang pernah dilakukan oleh Kelompok Tani Sri Rejeki antara lain: kerjasama usaha pengadaan bibit ternak itik umur sehari (DOD) dengan pembibitan ternak itik di Arjawinangun (Cirebon), dan Perusda Pertanian Kabupaten Brebes dalam perdagangan telur itik. Kerjasama ini sempat berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan pada akhirnya macet, akibat usaha yang dilakukan oleh anggota banyak yang macet. Kemacetan ini diakibatkan usaha bersama perdagangan telur yang dilakukan oleh kelompok kekurangan permodalan dan kendala manajemen dan sebagian dari anggota kelompok tani mengalami kebangkrutan akibat kenaikan harga bahan pakan ternak.

Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani di Desa Sitemu sudah dilakukan sejak kelompok tani ternak itik terbentuk di Desa Sitemu (1992) melalui Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) pada waktu itu. Penguatan dari dinas/instansi tersebut, kelompok tani yang ada bisa membentuk Koperasi Tani Ternak Itik dan telah berbadan hukum pada tahun 1994. Tetapi karena kendala manajemen koperasi tersebut pada akhirnya bubar.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan instansi pembina kelompok tani di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pemalang dalam hal ini yang dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian diperoleh informasi bahwa penguatan kelembagaan kelompok tani yang ada di Kabupaten Pemalang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Kelompok-kelompok tani yang ada dibina dan dibimbing untuk berkembang dan secara bertahap kelas kelompok meningkat dari Madya menjadi kelas Utama. Setelah Kelas Kelompok sudah pada tingkat Utama diharapkan kelompok tani bisa menjadi Gapoktan (Gabungan Kelompok tani) Proses penggabungan kelompok dilakukan oleh kelompok tani sendiri sesuai dengan komoditas yang diusahakan oleh kelompok yang bergabung tersebut. Idealnya menurut Petugas dari Kelompok Fungsional, satu desa ada satu Gapoktan. Dengan demikian kelembagaan kelompok akan semakin kuat demikian juga permodalan yang dimiliki .

Dengan berkembangnya kelembagaan kelompok tani tersebut, berkembang pula program penguatan modal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian. Ketika masih berbentuk kelompok tani, bantuan modal yang diterima oleh kelompok bersifat bantuan bergulir, setelah berkembang menjadi gabungan kelompok tani (Gapoktan) bentuk bantuan yang diterima oleh kelompok adalah kredit bersubsidi (khusus).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 868 kelompok tani, dan 38 gabungan kelompok tani (Gapoktan). Bantuan penguatan modal untuk gabungan kelompok tani yang bersumber dari Departemen Pertanian melalui dana dekonsentrasi sebesar 100 juta rupiah per gapoktan pada tahun 2007. Pemberian bantuan ini direncanakan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan gapoktan yang dinilai usahanya berkembang .

Pendekatan pemberian bantuan modal untuk penguatan gapoktan menurut pengkaji kurang tepat, karena dengan pola bantuan tersebut banyak kelompok tani yang berusaha melakukan penggabungan kelompok tani hanya sekedar untuk bisa memperoleh bantuan yang diperuntukkan bagi gapoktan tanpa mempertimbangkan kesiapan dari masing-masing kelompok tani untuk bergabung. Dinas Pertanian sebaiknya hanya mendorong dan memfasilitasi agar kelompok tani yang sudah berkembang bisa mandiri di dalam mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan yang ada dengan terus-menerus melakukan pendampingan agar gapoktan yang ada lebih mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian kelompok dalam mendapatkan permodalan, dan kemandirian mengelola usaha yang dilakukan gapoktan (manajemen), serta

kemandirian pengurus di dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok.

Penguatan kelembagaan kelompok tani berkaitan erat dengan kelembagaan yang ada di Desa Sitemu dan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Pemalang. Disamping kelompok tani, kelembagaan lain yang ada di komunitas Sitemu juga perlu dikuatkan. Kelembagaan tradisional seperti *mertelu* yang sudah ada dan berkembang di masyarakat juga perlu untuk dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan peternak miskin. Keberadaan kelembagaan dan *stakeholder* ini saling terkait dan memiliki pola-pola hubungan dengan kelompok tani di Desa Sitemu. Pola hubungan dan pengaruh kelembagaan dan *stakeholder* bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 5 Matriks Kelembagaan dan *Stakeholders* yang berhubungan dengan Pemberdayaan Peternak Miskin di Desa Sitemu.

Kelembagaan/ Stakeholders	Kategori	Relevansi	Ciri Kelembagaan/ Organisasi, Kapasitas	Minat Komitmen Status Quo Vs Reformis	Pengaruh (Besarnya, Kecil)
Pemerintah Desa	Pemerintahan	V	Organisasi di tingkat desa	Status Quo	Besarnya
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	Pemberdayaan	V	Kelembagaan masyarakat, di tingkat desa	Status Quo	Besarnya
Badan Kredit Desa (BKD)	Keuangan	V	Lembaga keuangan di tingkat desa	Status Quo	Kecil
Unit Pelayanan BPR BKK Taman	Keuangan	V	Lembaga Keuangan di tingkat kecamatan	Status Quo	Kecil
<i>Kelembagaan Tradisional Mertelu</i>	Ekonomi dan social	V	Kelembagaan tradisional di komunitas peternak itik	Reformis	Besarnya
<i>Pengijon</i>	Perdagangan	V	Lembaga perdagangan di pedesaan		Besarnya (pengaruh negatif)
Organisasi Keagamaan (Jamaah Tahlil dan Yasinan)	Sosial	V	Lembaga sosial keagamaan		Kecil
Swasta (Pengusaha Rice Mill)	Jasa dan Perdagangan	V	Lembaga ekonomi		Besarnya
Bappeda	Pemerintah	V	Pelay. Publik	Status Quo	Besarnya
Dinas Pertanian	Pemerintah	V	Pelay. Publik	Status Quo	Besarnya
BRI Unit Desa	BUMN	V	Lembaga Keuangan		Besarnya

Sumber: Peta Sosial Desa Sitemu Tahun 2007 (Data setelah diolah)

Dari berbagai kelembagaan/stakeholders yang ada di Desa Sitemu dan di Kabupaten Pematang Jaya, memiliki peran yang besar di dalam memberdayakan peternak miskin yang ada di Desa Sitemu sesuai fungsi dari masing-masing kelembagaan/stakeholder. Kelembagaan tradisional seperti *mertelu* punya potensi untuk dikembangkan karena bisa mendatangkan investasi bagi usaha ternak itik di Desa Sitemu dari para pemilik modal dan tidak sebatas dalam hubungan ekonomi tapi juga sosial antara *patron* (pemilik modal) dan *client* (peternak miskin).

6.3 Ikhtisar

Program pemberdayaan masyarakat petani sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) dan oleh pemerintah pusat yang khusus ditujukan kepada peternak melalui Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP). Kedua program tersebut tidak secara khusus ditujukan untuk memberdayakan peternak miskin, tetapi peternak miskin diorganisir di dalam kelompok-kelompok kecil bersama peternak yang tidak miskin. Hal ini dilakukan karena ketentuan untuk mendapatkan pinjaman modal harus ada jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM).

Adapun tujuan dari kedua program pemberdayaan baik Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) maupun Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP) adalah untuk meningkatkan pendapatan. Upaya yang dilakukan melalui kedua program tersebut adalah dengan memberikan sumberdaya modal kepada peternak itik dan juga memberikan keterampilan di dalam beternak. Keterampilan diberikan melalui pelatihan keterampilan di dalam budidaya ternak itik, pengetahuan tentang penyakit yang menyerang ternak itik dan cara pengendaliannya kepada calon penerima pinjaman (khusus pada program PPAP).

Demikian juga lembaga keuangan yang ada di tingkat kecamatan seperti BRI Unit Desa dan BPR BKK yang memberikan fasilitas kredit untuk pengembangan ekonomi lokal khususnya bagi peternak itik. BPR BKK dalam memberikan pelayanan kredit juga memberikan pelayanan dengan cara membuka unit pelayanan kredit di Desa Sitemu untuk mendekatkan pelayanan.

Tujuan dari kedua lembaga keuangan tersebut adalah memberikan kredit untuk memperkuat kapasitas petani/peternak di Desa Sitemu dan sekitarnya.

Kelembagaan keuangan seperti Bank BRI sempat menghentikan pinjaman kepada peternak akibat adanya wabah flu burung. Penghentian tersebut sangat memberatkan peternak itik di Desa Sitemu dimana modal untuk pengembangan usaha didapatkan dari lembaga keuangan BRI Unit Desa.

Adapun penguatan kapasitas kelembagaan secara tidak langsung telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pematang Jaya melalui program PPEK bagi kelompok penerima pinjaman, meskipun tujuannya untuk mengembangkan usaha anggota yang tergabung dalam kelompok-kelompok. Dengan berkembangnya usaha anggota kelompok pada akhirnya akan semakin memperkuat kapasitas kelompok tani.

Kelembagaan lain yang perlu dikuatkan adalah kelembagaan tradisional *mertelu*. Kelembagaan ini memiliki potensi untuk dikembangkan karena disamping unsur ekonomi juga ada unsur sosial dalam pola hubungan *mertelu* ini. Hubungan *patron client* terjadi antara pemilik modal dan peternak miskin. Hal ini dapat dijadikan alternatif dalam mengembangkan peternak miskin disamping dari program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kelembagaan keagamaan yang tumbuh dan berkembang di komunitas Sitemu seperti Jama'ah Tahlil dan Kelompok-kelompok Yasinan punya potensi dalam memberdayakan peternak miskin. Kelompok-kelompok keagamaan tersebut sebagian diantaranya diikuti oleh peternak itik. Melalui tokoh-tokoh agama yang memimpin kelompok keagamaan tersebut bisa dibangun nilai-nilai baru seperti kejujuran, kesabaran, ketekunan di dalam menjalankan usaha, melunasi hutang/pinjaman.

Kelembagaan swasta yang ada di Desa Sitemu dan ikut berperan di dalam membantu peternak itik adalah pengusaha penggilingan padi (*rice mill*). Para pengusaha ini membantu peternak dalam memenuhi kebutuhan bahan pakan ternak itik berupa bekatul. Bekatul merupakan bahan pakan yang diberikan kepada ternak itik dalam jumlah terbanyak. Pengusaha penggilingan padi sengaja menyiapkan sebagian produksinya untuk peternak itik yang ada di sekitar tempat usahanya. Dengan demikian kepedulian sosial terhadap peternak kecil juga ada, meskipun mereka juga mencari keuntungan usaha.

VII. ANALISIS

7.1 Perkembangan Kelompok tani ternak itik di Desa Sitemu

Komunitas peternak itik di Desa Sitemu sudah ada sejak tahun 1947, dengan beternak itik secara mengembara dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ketika musim panen tiba. Cara beternak seperti ini diwariskan kepada generasi berikutnya sampai kurun waktu tahun delapan puluhan. Dan mulai tahun sembilan puluhan mulai muncul ide-ide untuk membentuk Kelompok tani ternak. Pada tahun 1992 baru terbentuk kelompok tani ternak itik dengan nama Kelompok Tani Ternak Itik Sri Rejeki dengan jumlah anggota 15 orang . Dan pada tahun 1993 anggota kelompok bertambah menjadi 20 orang peternak. Ide untuk membentuk kelompok berasal dari peternak itu sendiri dengan difasilitasi oleh Petugas Dinas Peternakan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Adapun tujuan dari dibentuknya kelompok tani ternak itik pada waktu itu adalah untuk mewadahi peternak itik yang ada pada waktu itu. Akan tetapi tidak semua peternak itik masuk kedalam kelompok, karena sebagian peternak belum yakin manfaat berkelompok.

Dalam perkembangannya, kelompok tani ternak itik Sri Rejeki berhasil membentuk Koperasi Tani Ternak Itik (KTTI Sri Rejeki) dengan memiliki Badan Hukum pada tahun 1994. Dan mulai saat itulah kelompok tani ternak/ KTTI Sri Rejeki bisa mendapatkan bantuan permodalan dari berbagai dinas/instansi dari tingkat kabupaten, provinsi dan juga dari pemerintah pusat. Setelah terbentuk koperasi, bantuan permodalan untuk pengembangan koperasi yang diterima oleh kelompok dari Menteri Koperasi pada waktu itu, menggugah peternak lain yang belum tergabung ke dalam kelompok untuk membentuk kelompok tani ternak itik .

Dan pada tahun 1995 terbentuk kelompok tani ternak baru dengan nama Kelompok Tani Ternak Itik Wijaya Kesuma. Kelompok ini beranggotakan 20 peternak itik dan diketuai oleh Wastar. Kehadiran kelompok tani ternak itik Wijaya Kesuma ini sempat mewarnai dinamika kelompok tani ternak itik yang ada di Desa Sitemu. Karena kedua kelompok berusaha untuk mendapatkan bantuan permodalan dari berbagai dinas/instansi/lembaga yang menyalurkan bantuan modal untuk kelompok. Dengan adanya persaingan tersebut sempat

memunculkan konflik yang disebabkan adanya kepentingan untuk mendapatkan bantuan. Dengan keterbatasan yang ada sebagai kelompok baru, sumberdaya peternak yang terbatas, dan akses untuk mendapatkan permodalan yang kurang, mengakibatkan kelompok Wijaya Kesuma tersisih dan tidak berkembang. Dan akhirnya pada akhirnya bubar setelah sebagian dari anggota kelompok masuk ke dalam Kelompok Tani Ternak Itik Sri Rejeki, termasuk ketua kelompoknya.

Perkembangan selanjutnya, koperasi tani ternak yang telah terbentuk hanya bertahan selama dua tahun. Pada tahun 1997 koperasi tersebut bubar disebabkan kendala manajemen. Dan hanya tinggal ada kepengurusan Kelompok Tani Ternak Itik Sri Rejeki dan aktivitas kelompok tidak berjalan. Mulai tahun 2002 setelah adanya pembinaan dari Dinas Pertanian dalam rangka persiapan untuk mengikuti Evaluasi Kelompok Agribisnis berbasis ternak itik tingkat nasional Kelompok Tani Ternak Itik Sri Rejeki mulai aktif kembali. Tahun 2003 dinyatakan sebagai juara III tingkat nasional dengan mendapatkan uang pembinaan Kelompok dari Pusat dan Provinsi serta bantuan peralatan untuk pengolahan pakan ternak. Disamping itu Kelompok mendapatkan paket bantuan permodalan dari Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP) dari Departemen Pertanian melalui Dirjen Produksi Peternakan sebesar 100 juta rupiah untuk 20 orang peternak. Sebagian dana yang diterima peternak, digunakan untuk usaha bersama perdagangan telur itik yang dikelola oleh Pengurus Kelompok. Tujuan dari pengurus kelompok adalah agar pembelian telur dari anggota tidak dikuasai oleh "juragan" yang selama ini menguasai pembelian telur dengan harga yang rendah karena sebagian besar peternak sudah terikat pinjaman. Dengan demikian yang menentukan harga telur adalah juragan/tengkulak. Dalam kondisi demikian peternak itik sulit sekali untuk lepas dari juragan dalam menjual telur, karena telur yang akan dihasilkan oleh ternaknya sudah menjadi milik juragan. Usaha bersama perdagangan telur ini hanya berjalan kurang dari satu tahun, karena masalah permodalan. Hal ini disebabkan sebagian peternak itik banyak yang bangkrut usahanya. Pengembalian dana pinjaman anggota kelompok juga macet pada bulan ke tujuh setelah menerima dana pinjaman. Hal ini disebabkan karena peternak kesulitan di dalam usahanya karena adanya kenaikan harga bahan pakan ternak. Sebagaimana dikemukakan oleh ketua kelompok Tani Ternak itik Sri Rejeki Ibu Rjnm :

"Selama peternak tidak berani lepas dari dari juragan, peternak tidak akan cepat bangun. Ketidakberanian tersebut diakibatkan karena

keterbatasan dalam cara berfikir, keterbatasan modal yang dimiliki peternak, terdesaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.”

Perkembangan jumlah rumah tangga yang beternak itik di Desa Sitemu berdasarkan hasil pendataan terakhir jumlah peternak itik ada sebanyak 31 peternak, tujuh peternak diantaranya merupakan anggota kelompok tani ternak itik Sri Rejeki yang pada awalnya berjumlah 30 peternak. Dinamika yang terjadi pada usaha beternak itik di Desa Sitemu yang merupakan usaha ekonomi lokal masyarakat, kondisi terakhir yang ada sangat memprihatinkan. Hal ini bisa diketahui dalam lima tahun terakhir jumlah rumah tangga yang mengusahakan ternak itik petelur mengalami penurunan. Keadaan ini apabila terus terjadi akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian akan menambah jumlah keluarga miskin yang ada di Desa Sitemu.

7.2 Analisis Faktor Penyebab Banyaknya Peternak Miskin di Desa Sitemu

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus atau *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan terhadap anggota kelompok tani ternak itik Sri Rejeki dan tokoh masyarakat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan serta Kelompok jabatan Fungsional selaku Pembina dari Kelompok tani, di Desa Sitemu, dapat diketahui bahwa kemiskinan yang terjadi pada peternak itik yang ada di Desa Sitemu disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, jumlah ternak itik yang dipelihara oleh para peternak tidak sesuai dengan skala ekonomi. Dari 31 peternak yang ada di Desa Sitemu, 12 peternak diantaranya dengan pemilikan antara 70 sampai 200 ekor. Usaha ternak itik merupakan satu-satunya usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. *Kedua*, peternak itik yang ada di Desa Sitemu sulit melepaskan diri dari ”juragan” telur di dalam memasarkan hasil produksi telur itik. ”Juragan” adalah sebutan yang digunakan untuk pedagang pengumpul telur itik yang membeli telur-telur milik peternak dengan harga dibawah harga pasar. Hal ini terjadi karena peternak sudah diberi uang terlebih dahulu sebagai pinjaman dan telur sebagai alat untuk melunasi pinjaman tersebut. Disini harga telur yang menentukan adalah juragan, dan posisi peternak hanya menerima harga yang ditetapkan. Sehingga posisi peternak di pihak yang lemah karena mereka sudah terlilit hutang. Sebagaimana dikemukakan oleh ketua kelompok Tani Ternak itik Sri Rejeki Ibu Rjnm :

“Selama peternak tidak berani lepas dari dari juragan, peternak tidak akan cepat bangun. Ketidakberanian tersebut diakibatkan karena keterbatasan dalam cara berfikir, keterbatasan modal yang dimiliki peternak, terdesaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.”

Selama perjalanan waktu kehidupan peternak itik di Desa Sitemu dari sebelum ada kelompok tani ternak maupun setelah memiliki kelompok, di dalam memasarkan hasil produksi berupa telur, tidak bias lepas dari “juragan” atau tengkulak. Setiap peternak itik mulai dari skala kecil sampai peternak dengan kepemilikan besar sulit untuk tidak berhubungan dengan juragan atau tengkulak di dalam memasarkan produksi telurnya. Hal ini diakui oleh para peternak, dimana pada saat-saat mereka butuh uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak kemana lagi harus meminjam selain kepada juragan telur.

Dari hasil pengamatan di lapangan, berkaitan dengan aktivitas pemasaran telur itik yang dilakukan oleh peternak dapat diketahui bahwa peternak tidak pergi untuk menjual telur, tetapi juragan telur yang mendatangi peternak untuk mengambil telur. Juragan mendatangi peternak setiap hari pada sekitar pukul 10.00. Tidak ada transaksi, yang terjadi peternak mengambil telur-telur itik yang sudah terkumpul di dalam tempat telur, kemudian membawanya keluar dan juragan memindahkan telur tersebut ke dalam keranjang telur sambil menghitung jumlah telur. Peternak itik dengan kepemilikan 200 ekor biasanya memiliki 2-3 orang juragan/tengkulak yang datang sesuai waktu yang telah disepakati bersama, sehingga masing-masing datang untuk mengambil telur pada hari yang ditentukan dan tidak bersamaan. Seorang juragan/tengkulak berani meminjami uang kepada peternak sebesar satu juta rupiah kepada seorang peternak apabila telur yang dihasilkan dari ternaknya rata-rata 100 butir per hari. Dengan pertimbangan apabila harga telur per butir lima ratus rupiah, maka dalam waktu dua puluh hari pengambilan telur akan lunas pinjaman tersebut. Pinjaman tersebut sangat bermanfaat di saat mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan telur dari hasil ternaknya yang diandalkan untuk melunasinya. Sebagaimana pernyataan dari Trd berkaitan dengan pinjaman yang diterima :

“Seumpama bangkrut utange akeh ya ora usah nyaur” artinya apabila usahanya bangkuk hutangnya banyak, ya tidak usah mengembalikan”.

Ada sebagian peternak yang berpendapat seperti tersebut di atas, dimana apabila pinjaman kepada juragan banyak dan usaha ternaknya bangkrut, maka tidak usah mengembalikan. Tidak sebaliknya apabila peternak mempunyai

pinjaman di lembaga keuangan seperti Bank, BPR, dan BKD yang akan selalu ditagih meskipun usaha ternaknya sudah bangkrut.

Dengan demikian kemiskinan yang terjadi pada peternak itik di Desa Sitemu termasuk ke dalam kemiskinan absolut, karena kemiskinan tersebut berkaitan dengan aspek pemasaran telur itik yang ada di Desa Sitemu. Meskipun hal tersebut bukan satu-satunya aspek yang menyebabkan masih banyaknya peternak yang tergolong miskin.

Dengan kondisi pemasaran telur seperti di atas, maka pendapatan peternak menjadi rendah. Usaha yang ada terancam bangkrut apabila terjadi kenaikan harga bahan pakan dan tidak diikuti dengan naiknya harga telur itik. Apabila usaha ternaknya bangkrut sangatlah sulit untuk bisa memulai lagi, karena terbentur permodalan. Sebagaimana pernyataan dari beberapa peternak berikut ini :

“Teman-teman saya yang sudah bangkrut juga butuh bantuan lagi. Dulu pernah mendapatkan bantuan tapi kan sudah istilahnya kleleplah, kepingin pemerintah menyambungkan lagi gimana caranya begitu Pak, teman-teman saya yang sudah bangkrut ingin ngingu bebek maning tapi modale mpun entek”.

Demikian harapan dari sebagian peternak yang usahanya telah bangkrut, meskipun sementara bekerja sebagai buruh karena ketiadaan modal modal yang dimiliki. Sementara modal yang ada hanyalah ketrampilan (*human capital*) beternak itik yang diwariskan oleh orang tua mereka.

7.3 Analisis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok tani Ternak Itik di Desa Sitemu

Penguatan kapasitas/pengembangan kelembagaan kelompok tani ternak adalah proses menciptakan pola baru kegiatan dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu karena didukung oleh norma, standar dan nilai-nilai dari dalam. Dengan demikian penguatan kelompok tani dimaksudkan agar di dalam kelompok tani tersebut tercipta pola baru di dalam kegiatan usaha tani ternak itik dan perilaku peternak yang baru dan lestari karena di dukung oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Desa Sitemu.

Penguatan/peningkatan kapasitas kelompok tani ternak itik dimaksudkan agar kelompok tani ternak itik dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit

pengolahan dan pemasaran dan unit jasa penunjanglainnya seperti alat dan mesin (alsin) pertanian sehingga menjadi organisasi petani/peternak yang kuat dan mandiri.

Penguatan kelembagaan kelompok tani ternak itik Sri Rejeki yang pernah dilakukan, diantaranya melalui Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP). Penguatan dilakukan oleh pemerintah melalui program pemberdayaan pelaku agribisnis (peternak itik) yang dilaksanakan melalui fasilitasi penguatan modal yang langsung ditransfer ke rekening kelompok. Pemanfaatan dana penguatan modal kelompok ini dilakukan melalui format pinjaman bergulir dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok, peningkatan kewirausahaan dan pembinaan usaha ekonomi produktif. Dana yang penguatan modal yang diterima oleh kelompok tani ternak sejumlah 100 juta rupiah untuk 20 orang anggota kelompok penerima paket dengan pola bantuan langsung masyarakat (BLM).

Adapun indikator keberhasilan dari pemberdayaan peternak itik melalui pola BLM ini adalah : 1). Terjadinya peningkatan modal usaha, 2). Peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan, 3). Peningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok, 4). Perkembangan usaha agribisnis dan agroindustri, 5). Peningkatan perguliran dana, 5). Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan mikro dan lembaga ekonomi pedesaan lainnya.

Hasil dari penguatan kelompok tani ternak itik Sri Rejeki melalui Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP) ini hanya berjalan kurang dari satu tahun setelah pelaksanaan proyek. Hal ini bisa diketahui dari indikator yang menunjukkan adanya perkembangan usaha anggota kelompok, seperti: jumlah kepemilikan ternak, usaha perdagangan telur, perdagangan pakan ternak dan jasa pengadaan bibit ternak serta peningkatan penerima perguliran sebanyak tujuh orang. Sehingga jumlah anggota kelompok berkembang menjadi 27 peternak. Perkembangan ini hanya berjalan selama tujuh bulan pelaksanaan proyek dan akhirnya macet akibat, adanya kenaikan harga bahan pakan seperti ikan segar, bekatul dan nasi aking dan tidak diikuti dengan kenaikan harga telur. Sebagaimana disampaikan oleh Rsdn berkaitan dengan macetnya dana perguliran :

“Masalah pengembalian dana dari Pemerintah ya ini istilahnya mandeg rumiyen. Mboten saged lancar karena kondisinya pakan mahal harga telur ndak stabil.”

Masalah pengembalian dana dari pemerintah maksunya dana perguliran “*mandeg rumiyen*” artinya berhenti dulu “*mboten saged lancar*” tidak bisa lancar karena kondisi harga pakan mahal sedangkan harga telur tidak stabil.

Sebagai gambaran perbandingan antara harga pakan dengan harga telur yang dijadikan patokan untuk menghitung keuntungan peternak itik di Desa Sitemu adalah sebagai contoh: harga telur per butir Rp800.00 dan harga pakan Rp1 000.00 per kg menurut peternak harga tersebut seimbang dan peternak ada keuntungan atau dengan kata lain harga telur satu butir bisa untuk membeli satu kilogram pakan itik. Sebaliknya apabila harga telur dua butir hanya mendapat pakan satu kilogram, maka peternak tidak memperoleh keuntungan.

Dari kondisi yang ada pada waktu itu bisa dikatakan bahwa penguatan yang dilakukan terhadap kelompok belum berhasil, karena anggota menjual telur itik kepada kelompok tidak kepada tengkulak/juragan. Selain itu tingginya harga pakan ternak itik terutama ikan segar diakibatkan karena adanya ombak besar sehingga nelayan tidak banyak yang melaut. Kenaikkan harga bekatul diakibatkan saat itu petani baru memasuki masa tanam padi, dan kenaikan harga nasi aking akibat pada saat itu musim penghujan sehingga produksinya berkurang karena kesulitan menjemur nasi.

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan (PPAP), baru sebatas memperkuat permodalan anggota kelompok, karena dana yang diterima oleh kelompok sebesar 100 juta rupiah langsung dibagi habis untuk 20 orang peternak. Sedangkan kelompok tani ternak itu sendiri belum mendapatkan dana penguatan kelompok sebagai modal awal usaha bersama untuk pemasaran telur dan penjualan pakan ternak. Permodalan untuk usaha bersama tersebut diambilkan dari penyisihan dana perguliran dari anggota, sehingga modal yang terkumpul nilainya kecil dan tidak bisa membantu kesulitan anggota ketika harga pakan mahal dengan menyediakan kebutuhan pakan dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Dinas Pertanian dan Peternakan berkaitan dengan upaya untuk memperkuat/mengembangkan kelembagaan kelompok tani adalah dengan melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan). Penggabungan kelompok tani dimaksudkan untuk memperkuat permodalan. Dengan kuatnya permodalan yang ada bisa membantu kesulitan yang dihadapi oleh anggota kelompok, usaha yang dilakukan kelompok bisa berkembang dan memiliki unit-unit bisnis yang bergerak ke luar kelompok/daerah

serta bisa mengakses permodalan dari kelembagaan pelayanan publik dan finansial. Dengan demikian kelompok akan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

7.4 Pemberdayaan Peternak Miskin Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani

Pemberdayaan peternak miskin merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat karena peternak merupakan bagian dari komunitas yang ada di dalam masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil jika indikator-indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program tersebut terpenuhi. Adapun indikator-indikator tersebut adalah : (1) berkurangnya jumlah penduduk yang termasuk katagori miskin; (2) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia; (3) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya; (4) meningkatnya kemandirian kelompok ditandai oleh makin berkembangnya usaha ekonomi produktif anggota dan kelompok, dan makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok dan makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lainnya dalam masyarakat.

Jumlah penduduk miskin di Desa Sitemu berdasarkan hasil pendataan social ekonomi penduduk (PSEP) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2005 berjumlah 340 KK (Kepala Keluarga). Dalam upaya pemberdayaan pada komunitas peternak itik tersebut, maka untuk melengkapi proses dialog dilakukan melalui diskusi kelompok kecil yang dihadiri oleh pengurus dan lima orang anggota kelompok yang dipilih dan dinilai berhasil dalam usaha ternak itik. Kegiatan dilaksanakan di sekretariat Kelompok tani ternak itik Sri Rejeki pada tanggal 3 Desember 2007 dari pukul 20.00 sampai dengan pukul 22.00. Dari hasil diskusi diperoleh gambaran bahwa permasalahan di dalam pemberdayaan peternak miskin adalah: (1) permodalan, (2) karakter petani yang kurang mendukung upaya pengembangan kelompok, (3) kurangnya kedisiplinan peternak sebagai anggota kelompok dan (4) pola hidup konsumtif.

VIII. STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI TERNAK ITIK SRI REJEKI

8.1 Latar Belakang Rancangan Program

Komunitas peternak itik yang ada di desa Sitemu, sebagai bagian dari komunitas masyarakat Desa Sitemu, memiliki pengaruh yang strategis dalam mendukung perkembangan sosial ekonomi masyarakat desa. Sejarah perkembangan desa Sitemu dari desa tertinggal menjadi desa yang maju, tidak bisa lepas dari pengaruh usaha ternak itik yang merupakan usaha ekonomi lokal sebagian besar rumah tangga yang ada di Desa Sitemu sejak puluhan tahun yang lalu. Dari usaha ternak itik ini, investasi yang masuk ke Desa Sitemu melalui pola bagi hasil yang dikenal dalam masyarakat dengan istilah *mertelu* ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dengan berkembangnya pola *mertelu*, tumbuh usaha-usaha perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan beternak itik seperti usaha perdagangan bibit ternak, pakan ternak, perdagangan telur itik. Akan tetapi kondisi yang ada sekarang ini kepercayaan (*trust*) investor terhadap pola *mertelu* semakin berkurang, akibat menurunnya nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat seperti kejujuran, perilaku konsumtif. Demikian juga kelompok tani ternak yang dimiliki oleh peternak sebagai wadah untuk membantu kesulitan yang dihadapi peternak, sudah mulai ditinggalkan oleh anggotanya.

Sebagai organisasi yang pada awalnya dibentuk oleh peternak, tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat peternak itik, yang diikat oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat dan kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sangatlah perlu untuk diberdayakan untuk bisa membantu kesulitan yang dihadapi oleh peternak itik yang ada di desa Sitemu. Disamping itu adanya kelembagaan tradisional *mertelu* yang juga punya andil besar dalam mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Sitemu yang diikat oleh norma-norma kejujuran, saling percaya dan saling membantu dalam pola hubungan *patron-client* selama berlangsungnya hubungan *mertelu*. Dari segi ekonomi, modal yang masuk ke Desa Sitemu untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui usaha ternak itik melebihi bantuan penguatan modal yang diberikan oleh pemerintah.

Jika dalam perkembangan terakhir, keterlibatan anggota dalam kegiatan kelompok tani ternak itik berkurang, karena pelayanan dari kelompok yang terhenti akibat kekurangan permodalan dalam usaha bersama pembelian telur, kepengurusan yang perlu diperbarui karena sebagian pengurus yang ada sudah tidak aktif lagi baik karena kesibukan lain, pindah tempat tinggal serta ada yang meninggal dunia. Selain itu kegiatan proyek dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang berbentuk penguatan modal kelompok yang dialokasikan ke Desa Sitemu sudah tidak ada lagi dalam tiga tahun terakhir. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat dan motivasi masyarakat untuk beternak itik apabila situasinya menguntungkan, dan masih adanya modal yang tersisa (*human capital*) berupa ketrampilan beternak .

Dari diskripsi tersebut telah merujuk pentingnya membuat strategi untuk memberdayakan peternak miskin melalui penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani ternak itik. Untuk itu dirancang program pengembangan masyarakat melalui serangkaian kegiatan secara partisipatif, mulai dari penelusuran masalah peternak miskin, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya peternak miskin serta menelusuri peran kelompok tani ternak dalam penanganan masalah yang dirasakan oleh anggota kelompok melalui diskusi kelompok dan terakhir dengan FGD. Untuk menjamin keberhasilan program pemberdayaan secara optimal maka keberlangsungannya tidak hanya tergantung dari dalam kelompok itu sendiri (*internal*), namun perlu memperhatikan kondisi eksternal dari kelembagaan lokal yang ada, *stakeholders* yang berkaitan dengan usaha ternak itik dan kebijakan pemerintah Kabupaten.

8.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya rancangan program ini adalah untuk penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani ternak dalam memberdayakan peternak miskin yang ada di Desa Sitemu. Rancangan ini merupakan rangkaian strategi untuk memberdayakan peternak itik dengan pendekatan partisipatif dengan melalui diskusi dengan peternak, pengurus kelompok dan *stakeholder*. Sasaran rancangan program ini adalah kelompok tani ternak dan peternak itik.

8.3 Program Aksi

Dalam rangka mencapai tujuan kajian ini yaitu memberdayakan peternak itik, maka disusun strategi berupa rancangan program aksi sebagai tertera pada Tabel berikut.

Tabel 4 Rancangan Program Pemberdayaan Peternak Miskin melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Ternak Itik

Program	Tujuan	Sasaran	Pelaksana	Pendukung	Jadual Kerja
Revitalisasi Kelompok Tani Ternak Itik (<i>Bonding</i>)	Meningkatkan kualitas hubungan kelembagaan dalam komunitas	Peternak itik	Pengurus	Kelompok Tani Tanaman pangan	1 tahun
Pengembangan jejaring (<i>Bridging</i>)	Meningkatkan kemampuan anggota klp dlm menghindari kerusakan lingkungan di kawasan usaha peternakan dan mengembangkan kemitraan antar komunitas	Pengurus kelompok, peternak itik dan anggota masyarakat	Pengurus KTTI Sri Rejeki	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	1 tahun
Pendayagunaan Sistem <i>Mertelu</i> untuk Menarik Investasi dalam Usaha Ternak Itik (<i>Creating</i>)	Memperluas akses terhadap pelayanan publik dan finansial	Anggota KTTI Sri Rejeki	Pengurus KTTI Sri Rejeki	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Asosiasi Peternak Pemilik Modal dan Tokoh Masyarakat	1 tahun

8.3.1 Program Revitalisasi Kelompok Tani Ternak Itik

Dengan menurunnya perkembangan kelompok tani ternak itik saat ini yang bersumber dari masalah permodalan dan kepengurusan kelompok yang perlu ditata kembali agar kelompok tani ternak itik Sri Rejeki dapat berfungsi kembali.

Aset yang dimiliki oleh kelompok seperti mesin-mesin pencacah ikan bisa dimanfaatkan untuk melayani kepentingan anggota kelompok maupun di luar anggota dalam bentuk pelayanan jasa alat dan mesin (alsin) sehingga semakin mempererat hubungan antar anggota dan anggota dengan pengurus. Dengan kuatnya ikatan dalam kelompok (kohesi) dan tumbuhnya rasa kebersamaan maka akan meningkatkan kegiatan dan kepedulian terhadap sesama warga masyarakat. Manajemen organisasi kelompok juga perlu ditata kembali agar semua anggota dilibatkan mulai dari perencanaan suatu kegiatan usaha kelompok, pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan anggota kelompok terhadap pengurus yang bisa mengganggu aktivitas kelompok tani ternak. Upaya revitalisasi kelompok tani ternak dapat dilakukan melalui (1) Penguatan kelompok tani ternak melalui penggantian pengurus yang tidak aktif, (2) Penguatan permodalan kelompok untuk memperkuat usaha bersama yang dilakukan oleh kelompok, (3) Mengadakan sosialisasi tentang perlunya berkelompok kepada peternak yang belum tergabung kedalam kelompok untuk memperkuat posisi tawar peternak terhadap produk yang dihasilkan.

8.3.2 Program Pengembangan Jejaring

Pengembangan ekonomi lokal melalui usaha beternak itik yang tergabung dalam wadah kelompok tani ternak diharapkan dapat melibatkan *stakeholders* yang lain (kelembagaan kolaboratif) seperti organisasi pemerintah (*Public Sector*), non pemerintah, swasta (*Private Sector*) dan masyarakat (*Participatory Sector*).

Berkembangnya usaha ternak itik dengan meningkatnya jumlah kepemilikan di masing-masing peternak, secara otomatis akan membawa dampak terhadap lingkungan di sekitar usaha peternakan. Kotoran ternak, sisa-sisa ikan segar dan pencemaran air sumur akibat meningkatnya jumlah kotoran ternak. Disamping itu dengan keterbatasan lahan yang ada, dimana seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk menyebabkan lokasi untuk peternakan juga terdesak. Dengan demikian diperlukan lahan untuk kawasan usaha ternak itik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu kiranya menjalin komunikasi dengan Dinas pengairan yang memiliki bantaran sungai agar bisa digunakan untuk kawasan perkandangan ternak itik.

Dengan pemasaran hasil ternak yang tidak sehat, dimana juragan telur membeli telur itik dari para peternak di Desa Sitemu dengan harga yang lebih rendah dari daerah lain, maka system pemasaran yang ada sangat tidak menguntungkan peternak. Sebagaimana pernyataan Rjnm, yang memiliki pengalaman dalam pemasaran telur.

“Dalam situasi seperti ini bagaimana akan bangun wong ndok 650 saya masih bisa menjual 900 rupiah”

Inilah realita yang ada, selisih harga pembelian telur yang dialami oleh sebagian besar peternak dengan kepemilikan kecil. Dalam kondisi usaha yang sulit, hasil produksi ternak ketika dijual harganyapun rendah (650 rupiah) per butir. Sementara peternak dengan skala pemilikan di atas 1000 ekor seperti Ibu Rjnm bisa memasarkan telur itik dengan harga 900 rupiah per butir.

Oleh karena itu perlunya kelompok tani ternak itik untuk mengembangkan kemitraan dalam memasarkan telur. Kerjasama kemitraan (*partnership*) untuk pemasaran telur bisa menjalin kerjasama dengan supermarket-supermarket yang ada di sekitar tempat usaha dan keluar kota sesuai peluang yang ada.

8.3.3 Program Pendayagunaan Sistem *Mertelu*

Berbagai program pemberdayaan melalui intervensi yang dilakukan oleh sektor publik yang dilaksanakan di kelompok tani ternak itik Sri Rejeki ternyata belum bisa memberdayakan anggota kelompok dan justru menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan modal dari pemerintah.

Belajar dari pengalaman berbagai program pemberdayaan yang bersifat *top-down* dan belum bisa memberdayakan peternak itik serta melihat perkembangan ekonomi lokal masyarakat peternak itik sebelum masuknya program dimana kelembagaan *mertelu* sudah tumbuh dan berkembang di komunitas sitemu. Setelah melalui diskusi dengan tokoh-tokoh peternak, perlunya program pemberdayaan dengan cara mengembangkan bentuk kelembagaan tadisional *mertelu*. dimana terjadi pola hubungan ketenakerjaan antara pemilik modal dan peternak miskin yang hanya mempunyai ketrampilan beternak. Hubungan yang terjadi tidak hanya sebatas hubungan ekonomi untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga terjadi hubungan sosial selama proses hubungan masih berlangsung. Pola hubungan ketenagakerjaan *mertelu* dinilai

masih punya potensi dikembangkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam hal ini peternak miskin.

Program pendayagunaan sistem mertelu ini dilaksanakan dalam rangka menarik investasi dari masyarakat pemilik modal yang tertarik dengan usaha ternak itik. Program dilaksanakan oleh Pengurus Kelompok tani Ternak Itik Sri Rejeki dengan melibatkan *stakeholders* baik dari sektor publik maupun sektor swasta dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Untuk mendukung program, perlu dukungan dan partisipasi dari masyarakat, karena tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat di lingkungan usaha peternakan program ini tidak bisa berkembang. Keterlibatan masyarakat adalah dalam hal keterlibatan tokoh masyarakat untuk bersama-sama merubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat sehingga diharapkan muncul nilai-nilai baru seperti kejujuran, memegang amanah dari usaha yang dititipkan oleh pemilik modal kepada peternak dan membangun sikap kesabaran di dalam menjalankan suatu usaha. Dengan demikian akan menumbuhkan kapital sosial di dalam masyarakat yang bisa memperbaiki kondisi yang ada sekarang. Nilai-nilai baru tersebut bisa dibangun baik melalui kelompok, maupun kelembagaan lain yang ada di komunitas Sitemu.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto.1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Kebijakan, dan implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Colleta and Cullen. 2000. *Violent Conflict and the transformation of Social Capital*. Washington DC.
- Effendi, S., Sjafrin Sairin, Alwi Dahlan. 1996. *Membangun Martabat Manusia*. Gajah University Press dan HIPPIIS Cabang Yogyakarta .
- Endriatmo Sutarto, Lala Kolopaking, Hartrisari Hardjomidjojo. 2006. *Analisis Sosial*. MPM IPB. Bogor.
- Fredian Tonny dan Arya Hadi D. *Sosiologi untuk Pengembangan Masyarakat*. MPM IPB. 2006.
- Israel Arturo. 1990. *Pengembangan Kelembagaan. Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1999. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kecamatan Taman Dalam Angka*. 2006. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang-Jawa Tengah.
- Koentjaraningrat, 1981. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta.
- Lala M Kolopaking dan Fredian Tonny. 2006. *Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan Pembangunan*. MPM IPB. Bogor.
- M.T Felix Sitorus dan Ivanovich Agusta.2006. *Metodologi Kajian Komunitas*. MPM IPB. Bogor.
- Mikkelsen, B, 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan.*, Judul asli Method for Development Works and Research. Penerbit Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
- Nugroho dan Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Malang-Bogor. LP3ES.

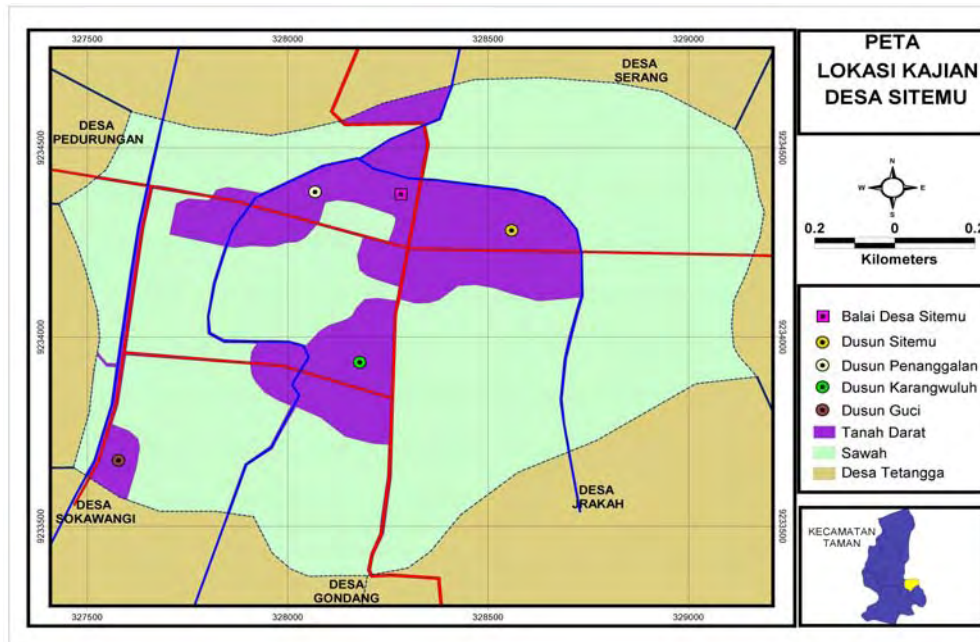
- Profil Desa*. 2006. Data Dasar Profil Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
- Said Rusli, Ekawati Sri Wahyuni, Melani A. Sunito. 2006. *Kependudukan*. MPM IPB. Bogor.
- Setiana Lucie, 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ghalia Indonesia Ciawi-Bogor.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sumardjo dan Saharudin. 2006. *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. MPM IPB. Bogor.
- Sumodiningrat, G., B. Santoso dan M. Maiwan. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta. Edisi Pertama. Penerbit IMPAC.
- Syahyuti. 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian*. IPB. Bogor.
- Titik Sumarti dan Yusman Syaukat. 2006. *Analisis Ekonomi Lokal*. MPM IPB Bogor.
- Triyatno Yuliharso. 2006. *Pemetaan Sosial*. Praktek Lapangan I di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Triyatno Yuliharso. 2007. *Evaluasi Pengembangan Masyarakat*. Praktek Lapangan II di Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Dicitak oleh Sinar Tani. 2007.
- Yin, Robert. K. 2002. *Studi Kasus (Desain dan Metode)* Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusman Syaukat dan Sutara Hendrakusumaatmadja. *Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal*. MPM IPB. 2006.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Metode Pengumpulan Data Kajian

Tujuan	Parameter	Sumber Data	Instrumen
1 Mengetahui dan menganalisa kemiskinan pada peternak itik	(i) pendapatan (ii) asset (iii) produktivitas (iv) modal (v) skill	Data primer dari peternak Data sekunder dari Podes, BPS	Wawancara dengan individu peternak dan wawancara kelompok
2 Mengetahui dan menganalisa program pemberdayaan peternak yang ada di Desa Sitemu	(i) memberikan masyarakat (sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan) (ii) kemampuan memenuhi kebutuhan hidup (fisik, ekonomi, sosial)	Dokumen dinas/lembaga, wawancara, observasi, diskusi kelompok	Pedoman wawancara
3 Mengetahui upaya-upaya penguatan kelembagaan kelompok tani	(i) akses (modal, layanan kebutuhan anggota) (ii) partisipasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) (iii) kemandirian (mendapatkan modal dan mengatasi masalah)	Data sekunder dari Dinas Pertanian dan Bappeda	Pedoman wawancara

Lampiran 2 Peta Lokasi Kajian



Lampiran 3 Daftar Nama-nama Peternak Itik di Desa Sitemu Tahun 2007

NO	NAMA PETERNAK	PENDIDIKAN	JML KEPEMILIKAN TERNAK ITIK (EKOR)	ANGGOTA KELOMPOK TANI/ BUKAN
1	TARIDI	SD	180	ANGGOTA
2	TARJUKI	SD	200	ANGGOTA
3	SUKARDI	SD	400	-
4	KARYAN	SD	150	ANGGOTA
5	RUSNADI	SD	150	ANGGOTA
6	KARNOTO	SMP	300	-
7	TARMIDI	SD	450	-
8	SARINTEN	SD	150	-
9	RUDJINEM	SARJANA	3600	ANGGOTA
10	GUNTUR	SLTA	1000	-
11	ABDULLAH	SLTA	170	ANGGOTA
12	TRIMO	SLTA	250	-
13	WASJO	SD	450	-
14	PENO	SLTP	1000	-
15	CISNO	SARJANA	1500	-
16	MULYONO	SLTP	700	-
17	RASIDI	SD	600	-
18	WASTRO	SD	150	-
19	KARJI	SD	150	-
20	SOLIKHIN	SLTP	150	-
21	RAWUD	SD	250	-
22	DIIN	SD	300	-
23	TOANI	SLTA	700	-
24	RUSNADI	SD	185	ANGGOTA
25	KHAER	SD	250	-
26	MARDIKIN	SLTA	150	-
27	SURONO	SLTP	40	ANGGOTA
28	WISMO	SD	70	-
29	TAKMAD	SD	200	-
30	KASBUNI	SLTP	200	-
31	TARJO	SD	180	-

Lampiran 4 Daftar Pertanyaan untuk Anggota Kelompok Tani (Peternak Miskin)

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Jumlah anggota rumah tangga :
5. Jumlah ternak itik yang dimiliki :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana bapak/ibu/ sdr memanfaatkan ternak itik yang dimiliki?
2. Berapa pendapatan rata-rata bapak/ibu per hari dari usaha ternak itik?
3. Lembaga apa saja yang diikuti oleh bapak/ibu/sdr?
4. Dari seluruh lembaga yang ada dan bapak/ibu/sdr ikuti, lembaga mana yang memiliki andil besar dalam memenuhi kebutuhan?
5. Bagaimana dengan keberadaan Kelompok tani ternak yang ada di wilayah bapak/ibu/sdr?
 - a Kegiatan apa saja yang bapak/ibu/sdr ikuti?
 - b Manfaat apa yang dapat bapak/ibu/sdr rasakan?
6. Kendala apa yang dirasakan oleh bapak/ibu/sdr selama menjadi anggota kelompok tani ternak itik ?
7. Apakah bapak/ibu/sdr aktif mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok?
8. Motivasi apa yang membuat bapak/ibu/sdr bersikap demikian (berdasarkan jawaban no.6)

Lanjutan

Daftar Pertanyaan untuk Petugas Pengelola Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Unit kerja :
3. Jabatan :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Pemikiran apa yang telah melatarbelakangi adanya Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK) di Kabupaten Pematang Jaya?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PPEK)?
3. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program?
4. Perkembangan apa saja yang telah dicapai selama ini?
5. Bagaimana saran dan harapan bapak/ibu/sdr untuk kelangsungan program tersebut?

Lanjutan

Daftar Pertanyaan untuk Petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan yang Menangani Pemberdayaan Kelompok Tani

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan/Jabatan :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Berapa jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Pematang?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk pengembangan Kelompok tani?
3. Upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para anggota kelompok tani?
4. Bagaimana dengan pembinaan kelompok tani yang ada di desa?
5. Bagaimana penanganan konflik internal yang terjadi di kelompok tani?

Lanjutan

Daftar Pertanyaan Untuk Pengurus Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Sitemu

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan :
5. jabatan :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejak kapan bapak/ibu/sdr menjadi pengurus kelompok ?
2. Motivasi apa yang membuat bapak/ibu/sdr bersedia menjadi pengurus?
3. Bagaimana kesan bapak/ibu/sdr selama menjalankan tugas sebagai pengurus ?
4. Kesulitan apa yang dihadapi oleh bapak/ibu/sdr selama ini?
5. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada pada anggota/kelompok tani, yang berkaitan dengan usaha ternak itik/usaha kelompok?
6. Bagaimana bimbingan dan arahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mendukung kelancaran tugas?
7. Kepada siapa bapak/ibu/sdr mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan?
8. Apakah bapak/ibu/sdr pernah mengikuti pendidikan/pelatihan tentang kelompok tani ternak?
9. Kemajuan apa saja yang telah dicapai selama ini oleh kelompok tani ternak bapak/ibu/sdr?
10. Bagaimana harapan bapak/ibu/sdr dalam upaya untuk memajukan kelompok tani ternak itik yang ada?



Gambar 2 Profil Salah Satu Responden (Peternak Miskin)